

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

**PERMOHONAN MUT'AH BAGI ISTRI YANG DICERAIKAN
TANPA SEBAB MENURUT ENAKMEN 17 TAHUN 2003
(STUDI DI MAHKAMAH SYARIAH JOHOR BAHRU)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Strata Satu (S.1) Dalam Ilmu Syariah**



Oleh:

DENNIS AIMAN BIN A.ROMZI

NIM: 101190111

Pembimbing:

Dr. Sayuti, S.Ag., M.H

Irsadunnas Noveri, S.H., M.H

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS
SYARIAH**

UIN SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

1444 H / 2023 M

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya asli saya yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar sarjana strata 1 (S1) di Fakultas Syariah UIN STS Jambi.

2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan ini telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di UIN STS Jambi.

3. Jika dikemudian hari terbukti bahwa karya ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di UIN STS Jambi.

Jambi, April 2023



Dennis Aiman Bin A.Romzi

NIM: 101190111

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Pembimbing I : Dr. Sayuti, S.Ag., M.H
Pembimbing II : Irsadunnas Noveri, S.H., M.H
Alamat : Fakultas Syariah UIN STS Jambi
Jl. Jambi-Muara Bulian KM. 16 Simp. Sei
Duren Jaluko Kab. Muaro Jambi 31346

Jambi, Februari 2023

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
Di –
Jambi

PERSETUJUAN PEMBIMBING

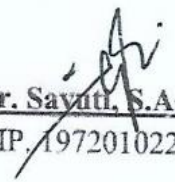
Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka skripsi Saudara Dennis Aiman Bin A.Romzi, 101190111 yang berjudul **"Permohonan Mutah Bagi Istri Yang Dicercaikan Tanpa Sebab Menurut Enakmen 17 Tahun 2003 (Studi Di Mahkamah Syariah Johor Bahru)"**. Telah disetujui dan dapat diajukan untuk dimunaqasahkan guna melengkapi syarat-syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) dalam Hukum Keluarga Islam pada Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.


Demikianlah, kami ucapkan terima kasih semoga bermanfaat bagi kepentingan Agama, Nusa dan Bangsa.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Pembimbing I


Dr. Sayuti, S.Ag., M.H
NIP. 197201022000031005

Pembimbing II


Irsadunnas Noveri, S.H., M.H
NIP. 197111082014121002

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Pembimbing I : Dr. Sayuti, S.Ag., M.H

Pembimbing II: Irsadunnas Noveri, S.H., M.H

Alamat : Fakultas Syariah UIN STS Jambi,
JL Jambi- Muara Bulian KM.16 Simp. Sei Duren,
Kab. Muaro Jambi 31346.
Telp. (0741) 582021.

Kepada:

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syariah

UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Februari 2023

Di JAMBI

NOTA DINAS

السلام عليكم ورحمة هلا وبركاته

Setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara Dennis Aiman Bin A.Romzi, SHK 101190111 yang berjudul: "Permohonan Mutah Bagi Istri Yang Dicercaikan Tanpa Sebab Menurut Enakmen 17 Tahun 2003 (Studi Di Mahkamah Syariah Johor Bahru)". Telah dapat di ajukan untuk di munaqasyahkan guna melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Strata Satu (SI) pada Fakultas Syariah Uin Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Maka dengan ini kami ajukan skripsi tersebut agar dapat diterima dengan baik.

Demikianlah, kami ucapkan terima kasih, semoga bermanfaat bagi kepentingan agama, nusa dan bangsa.

Wassalam,

PEMBIMBING I,

PEMBIMBING II,


Dr. Sayuti, S.Ag., M.H

NIP. 197201022000031005


Irsadunnas Noveri, S.H., M.H

NIP. 19711108 201412 1002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

FAKULTAS SYARIAH

Jalan Lintas Jambi-Muaro Bulian KM. 16 Simpang Sungai DurenKab. Muaro Jambi 36363

Telp/Fax : (0741) 583183 – 584118 website : www.iainjambi.ac.id

PENGESAHAN PANITIA UJIAN

Skripsi berjudul “PERMOHONAN MUTAH BAGI ISTRI YANG DICERAIKAN TANPA SEBAB MENURUT ENAKMEN 17 TAHUN 2003 (STUDI DI MAHKAMAH SYARIAH JOHOR BAHRU)” telah diujikan pada Sidang Munaqasah Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi pada tanggal 12 APRIL 2023. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) dalam Hukum Keluarga Islam.

Jambi, April 2023



Mengesahkan:

Dekan,

Dr. Saiful S. Ag., M.H

NIP. 197201022000031005

Panitia Ujian:

1. Ketua Sidang : Mustiah RH, S.Ag., M.Sv.
NIP. 19700706 199803 2003
2. Sekretaris Sidang : Zarkani, M.M
NIP. 197603262002121001
3. Penguji I : Dr. H. Kholil Syuaib, M.Ag
NIP.197207032007101003
4. Penguji II : Drs. H. Sulaeman, M.H.I
NIP. 196110051995031001
5. Pembimbing I : Dr. Sayuti, S.Ag., M.H
NIP. 197201022000031005
6. Pembimbing II : Irsadunnas Noveri, S.H.,M.H
NIP. 197111082014121002

Tialh
(Tialh)
(Tialh)
(Tialh)
(Tialh)
(Tialh)
(Tialh)

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ وَسِرَّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

Terjemah :

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan mukminat, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya, tidak ada masa idah atas mereka yang perlu kamu perhitungkan. Maka, berilah mereka mutah (pemberian) dan lepaskanlah mereka dengan cara yang sebaik-baiknya.”¹

¹ Q.S Al-Ahzab 33:49

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988. Adapun secara garis besar uraiannya sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
س	Sa'	Ś	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ه	Ha'	Ĥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ž	Zat (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ي	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Sad	Ş	Es (dengan titik di bawah)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber aslinya:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthha Jambi



ح	Dad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ء	'Ain	'	Koma terbalik di atas
ج	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
هـ	'Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	'Ya	Y	Ye

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulting Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulting Jambi

PERSEMBAHAN



Ku persembahkan skripsi ini untuk orang-orang yang kucintai:

Ayahanda Mahmud Bin Hadith dan Ibunda Yuhanis Binti Ithnain yang telah mendidik dan mengasuh anakanda dari kecil hingga dewasa dengan penuh kasih sayang, agar kelak anakanda menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua dan bermanfaat bagi Agama, Nusa dan Bangsa, seterusnya dapat meraih cita-cita murni.

Buat kedua-dua dosen pembimbing saya yang amat dihormati, Yaitu Dr. Sayuti, S.Ag., M.H, dan bapak Irsadunnas Noveri, S.H., M.H Yang telah membimbing saya sehingga dapat terselesaikan rangkaian skripsi ini. Jutaan terima kasih untuk semua ilmu, didikan dan pengalaman yang telah Kalian berikan.

Saudara-saudaraku.

Terima kasih di atas segala perhatian dan doa yang diberikan, semoga segala sesuatu yang terjadi di antara kita merupakan rahmat dan anugerah dari-Nya, serta menjadi sesuatu yang indah buat selama-lamanya.

Terima kasih juga kepada Yang Arif Tuan Mohd Afizul Hakim Bin Ibakarim atas bantuan dan kesabaran dalam membantu saya sepanjang kajian saya di Mahkamah Syariah Johor Bahru, Johor.

Sahabat-sahabatku, Ahmad Abdul Muhaimin Bin Ahmad, Mohd Arsyad Bin Raini, Shahrul Azwan Bin James serta teman-temanku lain yang tergabung dalam Persatuan Kebangsaan Pelajar-pelajar Malaysia di Indonesia Cabang Jambi, serta teman-teman dari Indonesia maupun teman-teman yang berada di Malaysia, yang setia telah memberikan semangat dan dorongan di kala suka maupun duka, semoga persahabatan kita tetap terjalin dengan baik selamanya.

Terima kasih atas segalanya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum

Puji dan syukur yang sedalam-dalamnya penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan kurnia-Nya. Shalawat dan Salam turut dilimpahkan kepada junjungan besar Nabi Muhamad SAW yang sangat dicintai. Alhamdulillah dalam usaha menyelesaikan skripsi ini penulis senantiasa diberi nikmat kesehatan dan kekuatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Permohonan Mutah Bagi Istri Yang Dicerai Tanpa Sebab Menurut Enakmen 17 Tahun 2003 (Studi Di Mahkamah Syariah Johor Bahru)”**.

Skripsi ini disusun sebagai sumbangan pemikiran terhadap pengembangan ilmu syari'ah dalam bagian ilmu hukum tentang perceraian menggunakan media elektronik. Juga memenuhi sebagian persyaratan guna memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S1) dalam Jurusan Hukum Keluarga pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Indonesia. Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis akui tidak terlepas dari menerima hambatan dan halangan baik dalam masa pengumpulan data maupun penyusunannya. Situasi yang mencabar dari awal hingga ke akhir menambahkan lagi daya usaha untuk menyelesaikan skripsi ini agar selari dengan penjadualan. Dan berkat kesabaran dan sokongan dari berbagai pihak, maka skripsi ini dapat juga diselesaikan dengan baik seperti yang diharapkan.

Oleh karena itu, hal yang pantas penulis ucapkan adalah jutaan terima kasih kepada semua pihak yang turut membantu sama ada secara langsung maupun secara tidak langsung menyelesaikan skripsi ini, terutama kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Su'aidi, MA., Ph.D selaku Rektor UIN STS Jambi, Indonesia, Ibu Dr. Rofiqoh Ferawati, SE., M.EI selaku Wakil Rektor I, Bapak Dr. As'ad Isma, M. Pd selaku Wakil Rektor II, dan Bapak Dr. Bahrul Ulum, S.Ag., MA selaku Wakil Rektor III.

2. Bapak Dr. Sayuti, S. Ag., MH selaku Dekan Fakultas Syariah UIN STS Jambi, Indonesia.

3. Bapak Agus Salim, MA., M.I.R., Ph.D selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Bapak Dr. Ruslan Abdul Gani, SH, MH selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan dan Bapak Dr. H. Ishaq, SH, MH selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama di Fakultas Syariah UIN STS Jambi, Indonesia.

4. Ibu Mustiah, S.Ag., M.Sy, selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga dan Bapak Irsyadunnas Noveri, S.H, MH selaku Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

5. Bapak Dr. Sayuti, S. Ag., MH selaku Pembimbing I dan Bapak Irsyadunnas Noveri, S.H, MH selaku pembimbing II yang telah banyak memberi masukan, tunjuk ajar dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

6. Bapak dan ibu dosen, asisten dosen dan seluruh karyawan dan karyawanati Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Jambi, April 2023

Penulis,



Dennis Aiman Bin A. Romzi

NIM : 101190111

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunan Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunan Jambi

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul : **Permohonan Mut'ah Bagi Istri Yang Dicercaikan Tanpa Sebab Menurut Enakmen 17 Tahun 2003 (Studi Di Mahkamah Syariah Johor Bahru)**. Kajian ini adalah bertujuan ingin mengetahui kaedah prosedur permohonan tuntutan mut'ah dan kaedah hakim memutuskan putusan tuntutan mut'ah menurut Enakmen 17 Tahun 2003 di Mahkamah Syariah Johor Bahru, Johor, Malaysia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode *yuridis empiris*, pengumpulan data melalui observasi (pengamatan), wawancara dan dokumentasi. Perbahasan dan kesimpulan penelitian adalah seperti berikut: **Pertama**, prosedur permohonan mut'ah menurut Enakmen 17 Tahun 2003 adalah pelanggan datang ke mahkamah, mendaftarkan kes berdasarkan bidang kuasa, penerimaan pendaftaran, penjadualan kes akan dilakukan, kes tersebut akan disediakan dari segi fail kes, saman / notis pemohonan, kes akan disebut pada hari yang telah ditetapkan, perbicaraan penuh akan dijalankan, mahkamah akan menguruskan, salinan perintah akan diserahkan kepada pihak-pihak pemohon, menerima apa-apa rayuan yang dikemukakan oleh pihak yang tidak berpuas hati dan proses rayuan akan diuruskan sehingga kes rayuan didengar dan diputuskan. **Kedua**, majlis hakim dalam memutuskan kasus tuntutan mut'ah didalam Pasal 58 Enakmen 17 Tahun 2003 adalah bersesuaian dengan solusi yang dikeluarkan oleh ulama' mazhab syafie' dan imamnya serta beberapa panduan yang telah diatur di dalam majlis hakim Johor.

Kata Kunci : Permohonan Mut'ah, Dicercaikan Tanpa Sebab, Mahkamah Syariah Johor Bahru.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi

DAFTAR SINGKATAN

AUKI	: Undang Undang Keluarga Islam Wilayah Persekutuan
cet.	: Cetakan
H	: Hijrah
Hlm	: Halaman
JKSM	: Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia
M	: Masehi
No.	: Nomor
Q. S	: Al-Quran dan Sunnah
ra	: Radiallahu ‘an
RM	: Ringgit Malaysia
SAW	: Sallallahu ‘alaihiwasallam
SWT	: Subhanahuwata ‘ala
ct	: Tanpa Tahun
UIN STS	: Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthha Jambh
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthha Jambh

DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Struktur Organisasi Mahkamah Rendah Syariah Johor Bahru	27
Tabel 2 : Aliran Pergerakan Kasus	47
Tabel 3 : Aliran Kasus Rayuan Mal Atau Jenayah Di Mahkamah Syariah Johor Bahru	49

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunan Jember
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunan Jember



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
NOTA DINAS	iv
PENGESAHAN PANITIA UJIAN	v
MOTTO	vi
TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vii
KATA PENGANTAR	ix
ABSTRAK.....	xi
DAFTAR SINGKATAN	xiii
DAFTAR TABEL	xiiiv
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	6
D. Kerangka Teori	7
E. Tinjauan Pustaka.....	10
F. Pendekatan Peneliti.....	12
G. Jenis Penelitian.....	13
H. Jenis Dan Sumber Data.....	13
I. Metode Pengumpulan Data.....	16
J. Teknik Analisi Data.....	18
BAB II PERMOHONAN MUT’AH	
A. Pengertian Mut’ah.....	21
B. Dasar Pemindaan Mut’ah.....	22

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suthna Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suthna Jambi

C. Macam-macam Mut'ah	24
-----------------------------	----

BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Geografis Dan Struktur Organisasi Mahkamah Rendah Syariah Johor Bahru	26
B. Sejarah Negeri Johor dan Mahkamah Syariah Johor Bahru	28
C. Lambang Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Johor Negeri Johor	39
D. Visi, Misi, Piagam Pelanggan Dan Bidang Tugas Dan Wewenang ...	40
E. Objektif Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Johor	43
F. Lokasi Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Johor	44

BAB IV MUT'AH TANPA SEBAB MENURUT ENAKMEN 17 TAHUN 2003

A. Prosedur Permohonan Mut'ah Di Pengadilan Menurut Enakmen 17 Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Johor Tahun 2003.....	46
B. Putusan Pengadilan Dalam Memutuskan Jumlah Bayaran Mut'ah Yang Harus Dibayar Oleh Mantan Suami.....	50

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	59
B. Saran-saran	59
C. Kata Penutup	60

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN.....

CURRICULUM VITAE.....

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam mengangkat derajat wanita dan menyetarakan wanita dengan pria dari segi hak dan tugas-tugas yang saling bergantung satu sama lain. Hakikatnya tidak dapat disangkal karena Islam mengangkat dan menegakkan status wanita sebagai pelengkap dan pendamping dalam kehidupan manusia. Islam juga sepenuhnya mengakui hak-hak dasar perempuan baik dari perspektif sosial maupun politik.

Dalam masa yang sama, Islam memperlakukan wanita sebagai manusia yang utuh dan manusia yang memiliki sesuatu hak dan kewajiban. Jika hak dan kewajiban tersebut dapat dipenuhi dengan penuh keyakinan, maka mereka akan segera mendapat pengakuan dan penghargaan sekaligus mereka berhak mendapatkan haknya. Pengakuan dan pujian yang diberi oleh Islam kepada perempuan dapat dilihat pada tanggung jawab yang berada di pundak laki-laki untuk menjaga mereka. Di usia muda, wanita diasuh oleh ayah (wali) mereka dan apabila sudah menikah, suami bertanggung jawab penuh atas pengawalan dan perawatannya.²

Pernikahan diciptakan oleh Allah SWT dengan tujuan dan hikmah yang tertentu, ia juga disebut sebagai sunatullah. di dalamnya terkandung hikmah yang amat dalam, untuk mententeramkan hidup hamba-hamba-Nya di dunia ini.³

² Mohd Sabree Nasri, *Hak Istri Selepas Perceraian Menurut Undang-Undang Keluarga Islam Di Malaysia: Analisis Faktor Penghalang Memperolehnya*, Journal of law & Governance KUIM, V.3 (2020)

³ M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, (Jakarta: Siraja, 2003), Cet. 1, h.1



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthra Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthra Jambi

Di dalam hadis riwayat Ibnu Majah Rasulullah SAW. menegaskan dalam Sabdanya: “Dari Ahmad bin al-Azhar, dari Adam, Isa bin Maymun, dari al-Qasi, dari Aisyah berkata: Rasulullah SAW bersabda: Nikah itu adalah sunnahku, siapa saja yang tidak melaksanakan sunnahku maka bukanlah termasuk ummatku” (HR. Ibnu Majah).⁴

Di dalam Al-Quran juga menerangkan tujuan Allah SWT menciptakan pernikahan pada Surah Al-Rum Ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ
 فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemah :

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”⁵

Ketidakseimbangan hak dan kewajiban sering menimbulkan perselisihan dalam rumah tangga sehingga menjadikan rumah tangga tersebut menjadi tidak harmonis karena tidak terciptanya kerukunan dan kedamaian dalam rumah tangga sehingga mengakibatkan berakhirnya rumah tangga tersebut yang ditandai dengan

⁴ CD al-Maktabah al-Syamilah, Sunan Ibnu Majah, Juz 5, No. Hadis: 1836.

⁵ Q.S Al-Rum 30:21

perpisahan. Mengacu pada isu perceraian yang saat ini tercatat di Pengadilan Syariah Negeri Johor semakin meningkat dan sangat mengkhawatirkan. Johor menyumbang 11,5% dari total 37.853 pasangan di negara Malaysia yang bercerai tahun lalu.⁶

Tosrin Jarvanthi, ketua Komisi Nasional Agama Islam Johor, mengatakan total 4.389 kasus perceraian di negara bagian Johor didasarkan pada statistik yang dirilis oleh Biro Statistik. Dengan peningkatan tersebut, wanita yang sudah menyandang gelar istri pasti merasa terbebani karena Sebagian besar kasus perceraian yang terjadi adalah di kalangan wanita yang tidak bekerja dan hal ini menyulitkan mereka untuk memulai hidup baru tanpa suami.⁷

Seiring dengan masalah ini, tuntutan setelah perceraian turut meningkat di pengadilan agama Johor. Antara tuntutan setelah perceraian yang berlaku di pengadilan agama Johor ialah tuntutan mut'ah. Mut'ah adalah bentuk pemberian yang menunjukkan rasa hormat kepada mantan istri yang telah mengabdikan kepada suami dan anak-anak selama perkawinan.

Di dalam seksyen 58 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Johor) 2003. Seksyen tersebut menyebut:

“Mut'ah atau pemberian “saguhati” kepada perempuan yang diceraikan. Selain daripada haknya untuk memohon nafkah, seseorang perempuan yang telah diceraikan tanpa sebab yang patut oleh suaminya boleh memohon mut'ah atau

⁶ Nor Azura Md Amin, '1,585 kes cerai di Johor bagi tempoh Mac hingga Julai', Iskandar Puteri, Sinar Harian, 7 september 2021.

⁷ Muhamad Aimy Ahmad, 'Johor sumbang 11.5 peratus kes perceraian di Malaysia', Iskandar Puteri, Utusan Malaysia, 25 November 2021.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunan Jambi

pemberian suguhati kepada Mahkamah, dan Mahkamah boleh, selepas mendengar pihak-pihak itu dan apabila berpuas hati bahawa perempuan itu telah diceraikan tanpa sebab yang patut, memerintahkan suami membayar sejumlah uang yang wajar dan patut mengikut Hukum Syarak”⁸

Mempunyai pendapatan dan kerjaya sendiri tidak menghalangi istri untuk menuntut mut’ah kerana itu adalah hak seorang perempuan apabila diceraikan. Maka, Istri bisa mengajukan tuntutan mut’ah ke pengadilan dan menyatakan jumlah yang relevan untuk dituntut. Ia juga hak wajib yang telah ditetapkan Allah SWT di dalam Al-quran, Allah berfirman:

وَلِلْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Terjemah :

“Bagi istri-istri yang diceraikan terdapat hak mut’ah dengan cara yang patut. Demikian ini adalah ketentuan bagi orang-orang yang bertakwa.”⁹

Walaupun pada dasarnya isteri yang diceraikan berhak mendapat bayaran mut’ah dari suaminya namun hak tersebut akan hilang, lupus atau lucut dalam beberapa hal keadaan. Salah satu daripadanya adalah apabila isteri bersetuju dalam perjanjian yang dibuat selepas perceraian bahawa dia tidak akan menuntut mut’ah daripada suaminya.

⁸ Enakmen 17 Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Johor Tahun 2003

⁹ Q.S Al-Baqarah 2:241

Merujuk kasus *Jorih Binti Doralim V Ibrahim Bin Mamat* 14 (2001) 1 JH 89, pemohon dalam kes ini selain menuntut bayaran nafkah iddah, ada juga menuntut bayaran mut'ah sebanyak RM5,000.00. Diputuskan oleh Mahkamah Tinggi Syariah Melaka bahawa tuntutan mut'ah ditolak kerana dalam catatan Sijil Daftar Cerai ada tertulis 'tidak menuntut' maknanya sebagai persetujuan Plaintiff tidak mahu menuntut.¹⁰

Secara umumnya, mereka yang tidak berhak mendapat mut'ah adalah yang disebabkan oleh perceraian yang dipilih oleh pihak istri seperti suaminya gila, berpenyakit sopak, mati puncuk serta perceraian yang disebabkan oleh fasakh, khuluk dan li'an.¹¹ Tambahan lagi, menurut pandangan sesetengah ulama, nusyuz yang disebabkan oleh perlakuan keji seperti berkhawat dan berzina juga menggugurkan hak seseorang bekas istri untuk memperoleh hak mut'ah.

Berdasarkan keterangan diatas, dapat menarik penulis untuk mengangkat satu judul berkaitan Permohonan Mut'ah tanpa sebab Menurut Enakmen 17 tahun 2003 di Negeri Johor Malaysia. Menurut beberapa permasalahan yang muncul, perkara ini akan menyumbang kepada persepsi dan tanggapan salah oleh segelintir mantan suami atau mantan istri mengenai mut'ah. Dengan meneliti dan menelusuri penerapan tuntutan mut'ah yang terjadi di pengadilan agama di Johor, Masyarakat dapat memahami dan mengetahui kaedah dan tatacara tuntutan mut'ah di Johor, Malaysia.

¹⁰ Jurnal Hukum JKSM Jil.1

¹¹ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Al Islami Wa Adillatuhu* , Jakarta : Gema Insani, 2011.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthha Jambi



B. Rumusan Masalah.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, peneliti mengajukan pertanyaan pokok sebagai topik pembahasan selama penyusunan skripsi ini, sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur permohonan mut'ah di pengadilan menurut Enakmen 17 Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Johor Tahun 2003?
2. Bagaimana pengadilan memutuskan jumlah bayaran mut'ah yang harus dibayar oleh mantan suami?

C. Tujuan Penelitian.

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan, perlu dikemukakan pula tujuan-tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian, yaitu:

1. Untuk mengetahui prosedur permohonan mut'ah menurut Enakman 17 Undang-undang Keluarga Islam Negeri Johor Tahun 2003.
2. Untuk mengetahui putusan pengadilan dalam memutuskan jumlah bayaran mut'ah yang harus dibayar oleh mantan suami.

D. Kegunaan Penelitian.

1. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada prodi hukum keluarga islam fakultas syariah UIN STS Jambi.
2. Sebagai bentuk tanggung jawab penulis untuk mengembangkan ilmu hukum keluarga islam di Malaysia umumnya dan di Johor Khususnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suftha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suftha Jambi



Kerangka Teori.

Maqasid Syariah.

Maqashid Syariah adalah tujuan Syariah dan rahasia yang dimaksudkan Allah dalam setiap hukum dari total hukum-Nya. Hakikat dari tujuan hukum Islam adalah mencapai kemaslahatan dan menghilangkan kemudharatan bagi manusia, sedangkan mabadi' (titik dasar) menitikberatkan pada nilai-nilai fundamental Islam, seperti keadilan, kesetaraan dan kebebasan. Hukum Islam maqashid atau mashlahat dhuriyyah merupakan sesuatu yang penting untuk kemaslahatan agama dan dunia.

Kegagalan untuk mengenali ini dapat mengakibatkan cedera dan bahkan hilangnya nyawa. Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar akan menjelaskan secara lengkap dan gambaran konseptual hukum syariah dan menjelaskan lima pokok kepentingan sesuai dengan tingkatan dan tingkat kepentingan dan kebutuhannya.¹²

Maqashid Syariah secara umum berarti maksud umum diturunkannya syari'at (hukum) oleh syari' (pembuat hukum).¹³ Terdapat empat aspek di dalam maqasid syariah yaitu :

- a) Kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat
- b) Syariah sebagai sesuatu yang harus dipahami
- c) Syariah sebagai satu hukum taklif yang harus dilakukan

¹² Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, "*Maqashid Syariah*", Amzah:Jakarta, 2009, Cet. 4 , hlm. 23.

¹³ Ridwan Jamal, "*Maqashid Al-Syari'ah dan Relevansinya dalam Konteks Kekinian*", Jurnal Jabatan Syari'ah (2020) , STAIN Manado, hlm. 4.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi

d) Syariah bertujuan untuk membawa manusia di bawah naungan hukum.

Selanjutnya Syariah diciptakan dengan tujuan membawa manfaat manusia untuk kehidupan ini dan akhirat sebagai aspek inti yang layak. Aspek ini diciptakan untuk menciptakan dan melestarikan lima elemen utama yang dikenal sebagai Maqashid Syariah atau Kulliyat Khamsah. Lima elemen utama tersebut adalah:

- a) Hifdz ad-din (memelihara agama)
- b) Hifdz an-nafs (memelihara jiwa)
- c) Hifdz al-aql (memelihara akal)
- d) Hifdz al-mal (memelihara harta)
- e) Hifdz al-irdl (memelihara kehormatan)

Mut'ah terkait dengan pembahasan hifdz an-nafs (pemeliharaan jiwa). Tidak semua wanita yang diceraikan bekerja, sehingga sedikitnya tuntutan harta atau mut'ah yang diajukan mantan suami kepada mantan istri dapat membantu mereka mempertahankan mata pencaharian setelah berpisah dari mantan suaminya. Jadi permintaan Mut'ah ini dapat membantu wanita yang diceraikan untuk melanjutkan hidup mereka.

Mut'ah juga terkait dalam pembahasan hifdz alirdl (memelihara kehormatan). Yaitu dengan ada syariat wajib bagi lelaki untuk memberi hak tuntutan mut'ah kepada istri yang telah diceraikan sebagai suatu kehormatan atau pemberian terakhir sebelum meneruskan kehidupan tanpa istrinya. Ia juga dianggap sebagai perpisahan secara baik dan mengelakkan rasa sakit hati.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthha Jambi



Berdasarkan firman Allah di dalam Al-quran Surah Al-ahzab ayat 49:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَعِيَهُنَّ وَسِرَّ حُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

Terjemah :

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan mukminat, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya, tidak ada masa idah atas mereka yang perlu kamu perhitungkan. Maka, berilah mereka mutah (pemberian) dan lepaskanlah mereka dengan cara yang sebaik-baiknya”.¹⁴

2. Teori Efektivitas Hukum.

Efektivitas hukum berarti bahwa orang benar-benar bertindak sesuai dengan norma hukum ketika mereka harus melakukannya,¹⁵ dan norma itu benar-benar diterapkan dan dipatuhi. Efektivitas berasal dari kata *effective* yang berarti keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Lawrence M. Friedman, keabsahan suatu hukum dapat dinilai dengan:¹⁶

1. Struktur Hukum

Bagian dari sistem hukum yang bergerak di dalam suatu mekanisme. Termasuk dalam pengertian ini adalah badan legislatif, badan administratif, dan berbagai badan yang diberi wewenang untuk

¹⁴ Q.S Al-Ahzab 5:49.

¹⁵ Lawrence M.Friedman, (*The Legal System A Social Science Perspective*) , Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial, Nusamedia, Bandung, 2009, hlm.32.

¹⁶ Winarno Yudho, S.H., M.A., dan Heri Tjandrasari, S.H., “*Efektivitas Hukum Dalam Masyarakat*”, Jurnal Hukum & Pembangunan, Universitas Indonesia, Hlm. 59.

menyelenggarakan dan menegakkan hukum. Hubungan dan ruang lingkup kewenangan berbagai instansi atau organisasi Badan-badan yang termasuk dalam komponen ini biasanya terdapat dalam konstitusi atau konstitusi suatu negara.

2. Subtansi Hukum

Hasil aktual diterbitkan oleh sistem hukum. Hasil ini dapat diwujudkan sebagai hukum in concreto (norma hukum individu) atau sebagai hukum in abstracto` (norma hukum umum). Hukum in abstracto (*general rules of law*) adalah hukum yang aturan-aturan yang berlaku tidak ditujukan kepada individu atau badan tertentu, tetapi kepada setiap orang untuk siapa aturan-aturan umum itu dibuat. Aturan hukum in concreto (norma hukum individu), di sisi lain, berarti aturan yang hanya berlaku untuk orang-orang tertentu.

3. Budaya Hukum

Demikian yang disebut komponen budaya ini muncul dalam bentuk sikap dan nilai masyarakat. Apakah masyarakat menggunakan peradilan dalam keadaan yang berbeda dipengaruhi oleh sikap dan nilai yang dikenal sebagai budaya hukum (*Legal Culture*).

Tinjauan Pustaka.

Terdapat beberapa penelitian terkait mut'ah yang dapat dijadikan referensi, Adapun mengenai penelitian dalam bentuk skripsi maupun jurnal yang meneliti tentang mut'ah. Antaranya adalah kajian yang telah dilakukan oleh:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



1. Prof. Dr. Najibah Mohd Zin dalam penelitian yang berjudul *Hak Wanita Dalam Islam: Cabaran-cabaran Pemodenan*¹⁷, penelitian ini menyatakan pembahasan tentang hak Wanita dalam hukum islam yang senantiasa di kritik oleh masyarakat barat dan aktivis Wanita Islam yang berpemikiran liberal.

2. Rizqia Annisa Paramita, dalam judul skripsi “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Mut’ah Dalam Putusan MA RI NO. REG. 441 K/ AG/ 1996*” Skripsi ini mendeskripsikan pandangan hukum Islam terhadap putusan Pengadilan Agung Republik Indonesia No. Reg. 441 K/AG/1996 tentang mut’ah. Untuk mengetahui keluasan hukum islam dalam mengatur tentang mut’ah.¹⁸

3. Syamsuddin, dalam judul skripsi “*Pengakuan Hukum Islam Terhadap Hak Mut’ah Mantan Istri Dalam Kajian Empat Mazhab (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan NO.1151/PDT.GF/2008.PAJS)*” Skripsi ini meneliti pengakuan hukum hak mut’ah bagi mantan istri dalam hukum islam menurut kajian empat mazhab.¹⁹

Setelah peneliti membuat tinjauan, kesemua referensi yang diatas membahaskan tentang mut’ah dan mempunyai tujuan masing-masing. Adapun perbedaan penelitian yang disediakan oleh peneliti adalah mut’ah yang dibahaskan menurut Enakmen 17 Tahun 2003 di Pengadilan Syariah Johor Bahru.

¹⁷ Prof. Dr. Najibah Mohd Zin, *Hak Wanita Dalam Islam: Cabaran-cabaran Pemodenan dari Faculty of Shariah and Law Sultan Sharif Ali Islamic University*. 11-12 April 2012.

¹⁸ Rizqia Annisa Paramita, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Mut’ah Dalam Putusan MA RI NO.REG.441K/AG/1996*” Fakultas Agama Islam-Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, (2010) hlm 9.

¹⁹ Syamsudin, “*Pengakuan Hukum Islam Terhadap Hak Mut’ah Mantan Istri Dalam Kajian Empat Mazhab (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan No. 1151/PDT.G/2008/PAJS)*”, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatilah Jakarta, (2014) hlm. 7.

Pendekatan Penelitian.

Metode Penelitian adalah cara melakukan sesuatu dengan melakukan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisis sampai menyusun laporan.²⁰

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris merupakan jenis penelitian sosiologis dan layak disebut dengan Studi industri yang berurusan dengan peraturan terjadi dan apa yang terjadi dalam kehidupan masyarakat.²¹ Atau dengan kata lain, ini adalah studi tentang situasi nyata atau situasi nyata yang terjadi dengan sengaja di masyarakat untuk mengetahui dan menemukan fakta dan informasi yang diperlukan.²²

Skripsi ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan Yuridis empiris digunakan untuk memandang hukum sebagai pola tingkah laku yang diwujudkan dalam penerapan peraturan perundang-undangan. Seterusnya untuk mengetahui undang-undang yang digunakan mahkamah syariah Johor menurut Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Johor Tahun 2003 dan pengalaman lapangan yang dilalui oleh peneliti.

²⁰ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, “*Metodologi Penelitian*” (PT. Bumi Aksara, Jakarta ; 2003), Hlm. 1

²¹ Bambang Waluyo, “*Penelitian Hukum Dalam Praktek*” (Sinar Grafika; Jakarta ; 2002), hlm 15

²² Bambang Waluyo, “*Penelitian Hukum Dalam Praktek*” (Sinar Grafika; Jakarta ; 2002), hlm 15

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

H. Jenis Penelitian

Setiap skripsi, termasuk tesis selalu memakai jenis penelitian di dalamnya. Ini terjadi karena jenis penelitian merupakan suatu alat penting supaya skripsi mencapai hasil yang optimal dan terlaksana dengan rasional dan terarah. Jenis penelitian yang digunakan di dalam skripsi ini yaitu;

Jenis Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan riset kualitatif dengan menggunakan metode pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi dan pemerhatian untuk memahami dengan menjelaskan keadaan social. Kaedah penyelidikan kualitatif melibatkan pengumpulan data daripada pengalaman yang signifikan dalam kehidupan seseorang

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan konseptual. Pendekatan konseptual adalah peneliti mengumpulkan data dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum dan dituangkan dalam bentuk uraian.

I. Jenis dan Sumber Data

Data dijadikan sebagai sebuah keterangan dan bahkan menjadi acuan untuk mempermudah peneliti dalam mencari ataupun mengamati suatu hal. Keterangan dari data tersebut bisa berupa kata-kata, kalimat, angka, simbol, dan lainnya.

Data adalah sekumpulan keterangan ataupun fakta yang dibuat dengan kata-kata, kalimat, simbol, angka, dan lainnya. Data disini didapatkan melalui sebuah proses pencarian dan juga pengamatan yang tepat berdasarkan sumber-sumber

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suttha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suttha Jambi



tertentu. Adapun pengertian lain dari data yaitu sebagai suatu kumpulan keterangan atau deskripsi dasar yang berasal dari obyek ataupun kejadian.

Dimana di dalam kumpulan keterangan tersebut diperoleh dari hasil pengamatan yang selanjutnya diolah menjadi bentuk lain yang lebih kompleks. Baik berupa informasi, database, dan lainnya. Apabila ditinjau secara bahasa, kata data yaitu berasal dari Bahasa Latin, yakni “Datum” yang artinya sesuatu yang diberikan. Dari istilah itu, maka bisa kita jumpai arti data yang adalah hasil dari pengukuran atau pengamatan suatu variabel tertentu dalam bentuk kata-kata, warna, angka, simbol, dan keterangan lain.

Di dalam skripsi ini terdapat dua jenis data yang digunakan untuk memperoleh data informasi sesuai dengan tujuan penelitian yaitu data primer dan data sekunder:

1. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Menurut Peter Mahmud Marzuki, dia merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas.²³ Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari lapangan, dengan penelitian langsung pada objek yang diteliti. Dalam skripsi ini data primer yang digunakan oleh penulis adalah Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam

²³ Dr Ahmad Shuib Et.Al. “*Kaedah Peneyelidikan Dan Pusat Reka Bentuk Pengajaran Dan Teknologi*”, Open University Malaysia, Edisi Pertama, Selangor Darul Ehsan: Meteor Doc. Sdn. Bhn, Hlm. 129.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthha Jambi



Negeri Johor Tahun 2003 dan Hasil wawancara dengan pegawai di Mahkamah Syariah Johor Bahru.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah bahan yang bersifat untuk melengkapi data primer. Dia merupakan data yang diperoleh dari bahan perpustakaan atau literatur yang mempunyai hubungannya dengan objek penelitian. Bersangkutan dengan skripsi ini, data sekunder diperoleh adalah melalui bahan-bahan bacaan dalam web. Bahan bacaan seperti buku-buku yang membahas tentang tuntutan mut'ah serta artikel atau jurnal yang terkait.

Sumber data dalam sebuah penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Kamus bahasa Indonesia, data diartikan sebagai kenyataan dalam tindakan sebagai opini yang disusun, informasi yang benar dan Informasi atau bahan yang digunakan dalam penalaran dan penyelidikan. Jadi ini artinya sumber data yang dijelaskan di atas adalah objek penelitian yang dilampirkan datanya. Sumber data itu bisa berupa objek, gerakan, orang, tempat, dll. Sumber data yang digunakan terdiri dari sumber data primer dan data sekunder :

1. Sumber Data Primer.

Sumber Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat yang akan diteliti.²⁴Sumber data primer yang digunakan di dalam skripsi ini merupakan kutipan dari wawancara dan

²⁴ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm.100.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



informan kunci yaitu pegawai di Mahkamah Syariah Johor Bahru dan dari peraturan perundang-undangan yang digunakan di Mahkamah Syariah Johor Bahru.

2. Sumber Data Sekunder.

Sumber Data Sekunder merupakan data yang diperoleh dari bahan perpustakaan atau literature yang mempunyai hubungannya dengan objek penelitian.²⁵ Sumber data sekunder yang diperoleh di dalam skripsi ini merupakan buku-buku ilmiah yang terkait dengan tajuk yang di teliti, jurnal hukum yang di peroleh dari departemen Kehakiman Syariah johor dan beberapa jurnal, skripsi dan bahan-bahan lain.

J. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah Teknik atau cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk menggali data dan fakta yang diperlukan dalam penelitian. Adapun jenis pengumpulan data dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Interview atau wawancara

Wawancara adalah percakapan dua orang atau lebih yang berlangsung antara narasumber dan pewawancara dengan tujuan mengumpulkan data-data berupa informasi. Oleh karena itu, teknik

²⁵ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm.100.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

wawancara adalah salah satu cara pengumpulan data, misalnya untuk penelitian tertentu.

Merujuk dari KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), wawancara adalah tanya jawab dengan seseorang (pejabat dan sebagainya) untuk dimintai keterangan atau pendapatnya mengenai suatu hal, dimuat dalam surat kabar, disiarkan melalui radio, atau ditayangkan pada layar televisi.²⁶ Kegiatan wawancara dapat dilakukan untuk berbagai tujuan dan oleh siapa saja, seperti jurnalis, pencari kerja, peneliti, dan sebagainya.

Wawancara adalah cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan untuk mencapai suatu tujuan. Teknis yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah dengan wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur adalah wawancara yang dilaksanakan secara terencana dengan berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya.

2. Observasi

Observasi adalah suatu aktivitas pengamatan terhadap suatu objek secara cermat dan langsung di lokasi penelitian, serta mencatat secara sistematis mengenai gejala-gejala yang diteliti. Kata observasi berasal dari bahasa latin yang memiliki arti melihat dan memperhatikan. Dalam dunia nyata, observasi erat berkaitan dengan objek dan fenomena baik faktor

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

²⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/wawancara> diakses pada 6 februari 2023 jam 22:00.

penyebab dan dampak secara luas. Orang-orang yang melakukan observasi mendapat sebutan pengamat. Pengertian observasi secara umum adalah kegiatan pengamatan pada sebuah objek secara langsung dan detail untuk mendapatkan informasi yang benar terkait objek tersebut. Pengujian yang diteliti dan diamati bertujuan untuk mengumpulkan data atau penilaian.

3. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi atau yang biasa disebut dengan kajian dokumen merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian dalam rangka memperoleh informasi terkait objek penelitian. Dalam studi dokumentasi, peneliti biasanya melakukan penelusuran data historis objek penelitian serta melihat sejauhmana proses yang berjalan telah terdokumentasikan dengan baik.

Dalam pengumpulan data, membahas permasalahan yang terkait dengan judul, penulis menggunakan metode dokumentasi. Yaitu suatu cara mengumpul data melalui arsip-arsip, buku-buku ilmiah dan apa sahaja yang menjadi sumber sah yang berkaitan.

Teknik Analisis Data

Untuk menganalisis data dan informasi yang sesuai dengan permasalahan yang dikaji peneliti, maka peneliti menggunakan analisis data kualitatif yaitu Analisa menghubungkan satu sama lain untuk mendapatkan kejelasan terhadap suatu kebenaran atau sebaiknya. Dengan cara berfikir yang terdiri atas:

(a) reduksi data, (b) penyajian data, (c) penarikan kesimpulan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

a. Reduksi Data

Secara umum, reduksi data adalah proses mengubah data rekaman ke dalam pola, fokus, kategori, atau berbagai pokok permasalahan tertentu setelah data terkumpul. Data yang terkumpul dan sudah terekam dalam berbagai catatan saat berada di lapangan tersebut kemudian dirangkum dan diseleksi.

Reduksi data juga dapat diartikan sebagai suatu proses pemilihan data, pemusatan perhatian pada penyederhanaan data, pengabstrakan data, dan juga transformasi dari data kasar yang muncul dari berbagai catatan yang tertulis saat dilakukannya penelitian di lapangan. Metode ini digunakan dalam memproses pemilihan data, menajamkan, menggolongkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data sehingga dapat ditarik dan divertifikasi.

b. Penyajian Data

Penyajian data adalah bentuk pengemasan suatu data secara visual sedemikian sehingga data lebih mudah dipahami. Tanpa ada penyajian yang tepat, sorang peneliti akan kesulitan untuk menganalisis hasil akhir penelitian. Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk tabel, diagram, maupun grafik. Pemilihan bentuk penyajian ini disesuaikan dengan jenis datanya, ya. Misalnya, diagram atau grafik sesuai untuk data kuantitatif.

Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat dan terkait hubungan antara kategori supaya memudahkan untuk memahami apa yang terjadi.

c. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan adalah sebuah hasil akhir dari suatu pemikiran. Selain itu, kesimpulan juga bisa diartikan sebagai suatu gagasan yang terdapat pada akhir pembicaraan. Dalam ilmu matematika, juga dikenal istilah kesimpulan dengan perhitungan menggunakan rumus tertentu. Penarikan kesimpulan merupakan salah satu Teknik analisis data yaitu dengan cara menyatukan data analisis yang dapat digunakan untuk mengambil Tindakan sebuah fakta itu diterima atau ditolak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

BAB II

PERMOHONAN MUT'AH

A. Pengertian Mut'ah.

Selain dibaca mut'ah, ia juga terkadang dibaca dengan mit'ah. Kata mut'ah sendiri merupakan variasi lain dari kata al-mata', yang berarti sesuatu yang dijadikan sebagai objek bersenang-senang. Secara definitif, makna mut'ah adalah "sejumlah harta yang wajib diserahkan suami kepada isterinya yang telah diceraikannya semasa hidupnya dengan cara talak atau cara yang semakna dengannya"²⁷ Mut'ah ialah sesuatu (uang, barang dsb) yang diberikan suami kepada istri yang telah diceraikannya sebagai bekal hidup (penghibur hati) bekas istrinya.²⁸

Menurut pemahaman yang diberikan oleh Wahbah Zuhaili dalam kitabnya *Fiqh Al Islami Wa Adillatuhu*, mut'ah adalah suatu pemberian harta yang wajib diberikan oleh suami kepada istrinya yang diceraikan selama hidup, dengan talak, tergantung kepada beberapa syarat.²⁹

Penulis kitab *I'annah at-Talibin* juga menyatakan bahwa 'wajib bagi suami membayar mut'ah kepada istri yang telah disentuh (bersetubuh) bahkan jika dia (istri) adalah budak, dengan sebab perceraian itu terjadi bukan karena meninggalkan salah satu dari mereka berdua'.³⁰

²⁷ Muhammad al-Khatib asy-Syarbainiy, *Mugniy al-Muhtaj*, juz 3, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), hlm. 241.

²⁸ Lihat Kamus Besar Bahasa Indonesia Online <http://kbbi.web.id/mutah>, diakses tanggal 13 April 2023.

²⁹ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Al Islami Wa Adillatuhu*, Jakarta : Gema Insani, 2011.

³⁰ Abi Bakar Utsman, *I'annah at-Talibin*, Juz 3, Dar al Kutub al Ilmiyah, 1995, hlm. 356

Jadi jelas, seorang laki-laki harus melakukan pembayaran kepada istrinya yang diceraikan, tergantung beberapa syarat. Istri yang diceraikan tanpa persetubuhan dan mahar disebutkan dalam akad nikah, maka istri itu tidak berhak menuntut mut'ah. Ini karena dia menerima setengah dari mahar dan dia belum melayani suaminya.³¹ Maka jelas disebutkan dalam Al-Quran tentang mut'ah atas kewajiban seorang suami memberi bayaran kepada istri yang telah diceraikan melalui firman Allah S.W.T dalam Al-quran surah al-Baqarah ayat 236:³²

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَقْرَضُوهُنَّ فَرِيضَةً مِّمَّا مَتَّعُوهُنَّ
 عَلَى الْمَوْسِعِ قَدَرَهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ

Terjemahannya:

“Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan istri-istri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan”.

B. Dasar Pemindaan Hukum Mut'ah.

Mut'ah ialah suatu bayaran yang wajib ke atas suami yang diberikan kepada isteri yang diceraikan tanpa sebab yang munasabah mengikut hukum Syarak.

³¹ PT Ichtiar baru van Hoeve, *Ensiklopedia Islam*, Jakarta, hlm. 133.

³² QS. Al-Baqarah (2) : 236

Manakala menurut seksyen 2 (1), EUUKI (Negeri Melaka) “mut’ah” ertinya bayaran sugu hati yang diberi dari segi Hukum Syarak kepada isteri yang diceraikan. Kadi Besar Pulau Pinang, Hj. Harussani bin Hj. Zakaria, dalam kes *Piah bte Said lwn Che Lah bin Awang* (1983) 3 JH 220, mendefinisikan mut’ah seperti berikut:

“Mut’ah adalah pemberian yang bertanggung ke atas seorang suami yang menceraikan isteri. Tanggungan mut’ah tidak gugur dalam apapun perceraian berlaku kecuali jika perceraian itu disebabkan keaiban di pihak istri terhadap suaminya atau perceraian kerana mati.”³³

Di dalam seksyen 58 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Johor) 2003. Seksyen tersebut menyebut:

Mut’ah atau pemberian “saguhati” kepada perempuan yang diceraikan. Selain daripada haknya untuk memohon nafkah, seseorang perempuan yang telah diceraikan tanpa sebab yang patut oleh suaminya boleh memohon mut’ah atau pemberian saguhati kepada Mahkamah, dan Mahkamah boleh, selepas mendengar pihak-pihak itu dan apabila berpuas hati bahawa perempuan itu telah diceraikan tanpa sebab yang patut, memerintahkan suami membayar sejumlah uang yang wajar dan patut mengikut Hukum Syarak³⁴

³³ Jurnal Hukum JKSM Jil.3

³⁴ Enakmen 17 Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Johor Tahun 2003



C. Macam-Macam Mut'ah.

Mut'ah mempunyai dua macam, yang pertama mut'ah ketika didalam perkawinan diartikan sementara. Yang kedua adalah Ketika didalam perceraian diartikan sebagai penghibur, karena apabila berlaku perceraian perasaan sakit hati juga turut hadir dan mut'ah merupakan penghibur untuk mengubati perasaan sakit hati tersebut.

Pasal 58 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Johor menyatakan bahwa wanita yang dicerai tanpa sebab yang patut boleh menuntut mut'ah dan pengadilan dapat memerintahkan suami untuk membayar sejumlah uang yang sesuai menurut hukum syariah.³⁵ Penafsiran atas ungkapan tanpa sebab yang seharusnya telah dirinci lebih lanjut dalam kasus *Sapiee bin Muda lwn Adnan Hawa bt Mohamad* dengan merujuk pada Kitab *Mughni Muhtaj* sebagai narasi syarat kelayakan seorang istri untuk menuntut mut'ah,³⁶ di antaranya adalah:

Perceraian dengan kematian suami / istri – suami tidak wajib membayar mut'ah
 Perceraian disebabkan oleh suami yang mewajibkan seorang suami untuk membayar mut'ah, Talaq, Li'an, Suami murtad, Fasakh nikah karena aib suami sebelum akad nikah, Perceraian yang disebabkan istri semata-mata – tidak wajib bagi suami untuk membayar mut'ah: Istri murtad, Istri memeluk Islam, Fasakh

³⁵ Enakmen 17 Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Johor Tahun 2003

³⁶ “Apakah itu Mut'ah? Layakkah saya menerima mut'ah”,

<https://peguamsyariefas.com.my/apakah-itu-mutah-layakkah-saya-untuk-menerima-mutah/>

Diakses pada tanggal 10 agustus 2022

nikah karena aib istri, Istri membatalkan pernikahan karena suami papa, Istri membatalkan pernikahan karena suami impoten.

@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi

State Islamic University of Suthan Thaha Saifuddin Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUTHAN THAHA SAIFUDDIN
J A M B I

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Geografis dan Struktur Organisasi Mahkamah Rendah Syariah Johor Bahru

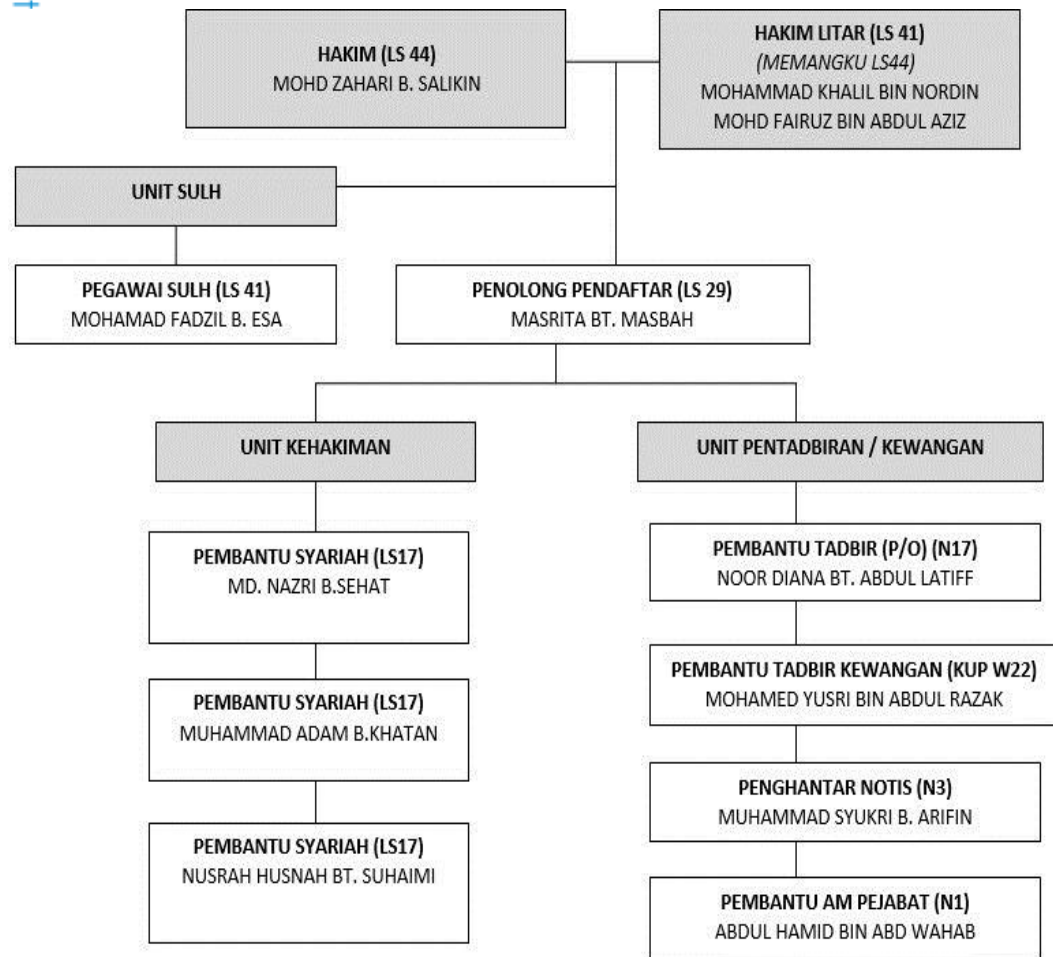
Mahkamah Rendah Syariah Johor Bahru terletak di daerah (Kabupaten) Johor Bahru yang merupakan tempat tujuan masyarakat untuk menjalankan aktivitas harian. Kedudukannya secara geografis yang berdekatan dengan pusat kota Johor Bahru, mempunyai fasilitas lengkap seperti Perpustakaan Wilayah, Bank-bank, Kantor pos, Masjid, Terminal Bus, TK, SD, SMP, dan Universitas.

Mahkamah Rendah Syariah merupakan Pengadilan kedua setelah Mahkamah Tinggi Syariah. Mahkamah Rendah Syariah Johor Bahru ini merupakan salah satu Mahkamah yang terletak di Negeri (Provinsi) Johor. Selain dari Mahkamah Rendah Syariah Johor Bahru ini, terdapat banyak Mahkamah Rendah Syariah yang berada di dalam Provinsi Johor yaitu di Batu Pahat, Kluang, Pontian, Mersing, Kota Tinggi, Ledang, Segamat, dan Muar.³⁷

Struktur Organisasi Mahkamah Syariah ini pula adalah mempunyai 11 departemen penting yang terdiri daripada 9 tenaga kerja bagi segala kerja yang hendak dilakukan di dalam Mahkamah ini. Mahkamah ini mempunyai departemen Hakim, Pegawai Sulh, Asisten Pendaftar, Asisten Senior Syariah, Asisten Pendaftar, Asisten Administrasi, Asisten Administrasi (Sekritaris), Asisten Administrasi Kewangan, Asisten Administrasi Rendah, Pengantar Saman dan Asisten Umum Rendah.

³⁷ Sejarah Mahkamah Syariah <https://syariah.johor.gov.my/profil-jabatan/maklumat-jabatan/sejarah/> (terakhir kali dikunjungi pada 11 Januari 2019 Jam 12:50).

Di bawah ini penulis memaparkan struktur organisasi Mahkamah Rendah Syariah Johor Bahru Sebagai berikut.



Tabel 1

Struktur Organisasi Mahkamah Rendah Syariah Johor Bahru³⁸

³⁸ Struktur Organisasi Mahkamah Rendah Syariah Johor Bahru
<https://syariah.johor.gov.my/mahkamah/johor-bahru/#tab-id-2> (terakhir kali dikunjungi pada 27 September 2022 Jam 12:30).

B. Sejarah Negeri Johor dan Mahkamah Syariah Johor Bahru.

Johor Darul Ta'zim, dikenal sebagai Johor atau Kesultanan Johor modern, adalah sebuah negeri di bagian selatan Semenanjung Malaysia. Johor mempunyai perbatasan darat dengan negeri Pahang di utara. Pada masa yang sama, barat laut ialah Melaka dan Negeri Sembilan. Perbatasan Johor ialah perbatasan maritim, dengan Singapura di selatan dan Indonesia di barat dan timur. Johor Bahru ialah ibu negeri Johor, berhampiran dengan negara tetangga, dan merupakan pusat ekonomi negeri itu. Kota Iskandar ialah pusat administrasi kerajaan Johor yang baru, dan Muar ialah kota diraja yang diumumkan oleh Sultan Ibrahim. Ibu kota Johor pada asalnya adalah Johor Lama sepanjang dinasti Sultan Johor klasik.³⁹ Sehingga sensus 2015, jumlah penduduk negeri ini ialah 3,553,600.⁴⁰ Johor mempunyai hutan hujan tropika yang pelbagai dan iklim khatulistiwa. Pergunungan di negeri ini adalah sebagian daripada Banjaran Titiwangsa, yang merupakan sebagian daripada Banjaran Tanah Sari terbesar yang menghubungkan Thailand dan Myanmar, dan Gunung Ledang adalah titik tertinggi di Johor.⁴¹

Negeri ini menjalinkan hubungan awal dengan kerajaan Funan, berdasarkan pertukaran hadiah. Selepas kejatuhan Kerajaan Funan, sebagian besar pantai Melayu diperintah oleh Siam, diikuti oleh Majapahit. Berpuluh tahun kemudian, dengan kemunculan Kesultanan Melaka, Islam tersebar ke seluruh pelosok kepulauan Melayu. Selepas kerajaan Melaka diambil oleh Portugis, sisa kerabat diraja Melaka berangkat ke

³⁹ Portal Rasmi Kerajaan Johor. <https://www.johor.gov.my/> diakses tanggal 6 februari 2023 pada jam 21:00.

⁴⁰ Portal Rasmi Jabatan Perangkaan Malaysia. <https://www.dosm.gov.my/v1/index.php> diakses tanggal 6 februari 2023 pada jam 21:30.

⁴¹ Portal Rasmi Jabatan Perhutanan Negeri Johor. <https://forestry.johor.gov.my/> diakses tanggal 6 februari 2023 pada jam 22:00.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambai
2. Dilarang memperbanyak sebagaiian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambai

sungai di Semenanjung Tanah Melayu ini, yang dipanggil oleh penduduk tempatan Sungai Johor, dan menubuhkan kesultanan baru yaitu Kesultanan Johor. Mereka cuba mengambil semula Melaka, dan akibatnya perang tiga segi tercetus antara Johor, Portugal dan Aceh. Satu lagi kesultanan yang semakin menonjol di kepulauan Sumatera utara. Dengan kedatangan Syarikat Hindia Timur Belanda (VOC).⁴²

Johor menamatkan pemerintahan Portugis dan memulihkan pemerintahannya sendiri, walaupun Melaka terus dikuasai oleh kuasa asing. Melalui konflik dalaman Kesultanan Johor dan kehadiran Syarikat Hindia Timur (EIC) di bagian utara Semenanjung Tanah Melayu. Perdagangan Belanda berubah daripada mengambil bagian dalam konflik tempatan kepada segera menaklukkan sebagian besar Sumatera, dan menandatangani perjanjian Inggeris-Belanda dengan Britain pada tahun 1824 untuk mengelakkan konflik selanjutnya untuk kali kedua.

Menurut perjanjian tersebut, Kepulauan Melayu terbagi kepada dua yurisdiksi, yaitu British memperoleh seluruh Semenanjung Tanah Melayu, manakala Belanda menyerahkan Melaka sebagai pertukaran kepada British, dan memperoleh seluruh pulau Sumatera dan kawasan lain, seperti yang terletak di bagian paling selatan wilayah Jawa. Di bawah pemerintahan British, pendidikan dan pembangunan diberi keutamaan, dan pengurusan diraja Johor sendiri dikemas kini di bawah pemerintahan beraja British. Pendudukan Jepun selama tiga tahun dalam perang dunia kedua menghalang pemodenan. Selepas perang, Johor menjadi sebagian daripada Provisional Malayan Union, kemudian menyertai Persekutuan Tanah Melayu dalam syarat-syarat tertentu dan

⁴² Portal Rasmi Kerajaan Johor. <https://www.johor.gov.my/> diakses tanggal 6 februari 2023 pada jam 23:00.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthra Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthra Jambi



memperolehi kemerdekaan sepenuhnya melalui Persekutuan, dan seterusnya menyertai Malaysia pada 16 September 1963.⁴³

Johor adalah pelbagai dari segi kaum, budaya dan bahasa. Negeri ini terkenal dengan tarian zapin tradisional. Ketua negara ialah Sultan Johor, dan ketua kerajaan ialah Menteri Besar. Sistem kerajaan sangat mengikut sistem parlimen British, dan administrasi negara dibahagikan kepada wilayah administrasi. Pada masa yang sama, Johor merupakan negeri pertama di Tanah Melayu yang melaksanakan sistem beraja. Pada masa itu, negeri-negeri lain di Tanah Melayu mengikut perlembagaan seterusnya. Johor juga merupakan satu-satunya negeri di Malaysia yang tidak menggunakan ikat kepala sebagai alat raja. Sebaliknya, sultan menggunakan mahkota, kon pain atau topi sebagai alat pemakaiannya. Perlembagaan kerajaan Johor pada tahun 1895 menetapkan agama Islam sebagai agama utama, tetapi agama lain boleh diamalkan dengan bebas. Sejak 1914, bahasa Melayu dalam dialek Johor-Riau telah diterima sebagai bahasa rasmi negeri, dan ia masih menjadi bahasa baku di seluruh Malaysia. Ekonomi berasaskan industri perkhidmatan dan pembuatan.

Mahkamah Syariah sebenarnya mempunyai peranan yang penting dalam menyelesaikan kasus-kasus dan masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat Islam, menjalankan dan seterusnya melaksanakan keadilan menurut undang-undang syarak. Sejauh yang diketahui Mahkamah Syariah Negeri Johor didirikan sejak tahun 1873 sebelum undang-undang Kerajaan Negeri Johor disahkan pada tahun 1895, yang diperkenal oleh Maharaja Abu Bakar Johor. Cuma

⁴³ Portal Rasmi Kerajaan Johor. <https://www.johor.gov.my/> diakses tanggal 6 februari 2023 pada jam 23:00.

Johor mempunyai enakmen khas.

Sebelum tahun 1895 lagi, telah wujud jawatan mufti dan kadi. Mengikut rekod separa rasmi yang terawal ditemukan menunjukkan jawatan mufti dipegang oleh Y.B Dato' Syed Halim Al-Attas dan jawatan kadi dipegang oleh Dato' Hj. Abdul Rahman dalam tahun 1873. Sehingga tahun 1895 agak sukar diterangkan tugas mufti dan kadi karena tiadanya departemen agama ketika itu. Tetapi yang jelas, mufti adalah juga sebagai pendamping hakim dalam perbicaraan di mahkamah-mahkamah sehingga tahun 1909.⁴⁴

Berdasarkan Penegakan Undang-Undang Diri Kerajaan Johor-Fasal 28, jemaah menteri telah dilembagakan secara bertulis dan kekal berlaku rombakan besar- besaran dalam struktur organisasinya. Antara departemen baru yang dicipta ialah Departemen Agama dan Pelajaran dengan memperkenalkan jawatan Yang Dipertuanya yaitu Yang Mulia Engku Mohd. Khalid. Pada 20 Agustus 1932 suatu muktamar tahunan kadi-kadi.

Johor telah diadakan untuk membahas mengenai mahkamah kadi, daftar nikah cerai dan rujuk, kutipan zakat, pembagian harta-harta zakat dan Baitulmal. Semua kadi dilantik oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan selaku Wali Al-Amar dalam negeri sebagaimana diwajibkan pelantikannya menurut hukum syarak. Semua keputusan mahkamah kadi adalah berdasarkan syariah muhammadiyah dalam mazhab syafie.

⁴⁴ Sejarah Mahkamah Syariah <https://syariah.johor.gov.my/profil-jabatan/maklumat-jabatan/sejarah/> (terakhir kali dikunjungi pada 11 Januari 2019 Jam 12:50).

Pendirian mahkamah di Negeri Johor ini adalah mengikut enakmen administrasi negeri Johor yaitu Enakmen bil 14 pada tahun 1978. Enakmen ini wujudkan bagi menyatukan dan meminda undang-undang yang berkaitan dengan pendirian, administrasi dan penyusunan semua perkara yang melibatkan dengan Agama Islam dan mahkamah-mahkamah di negeri Johor. Mahkamah Syariah di Johor telah didirikan pada 1 Januari 1978 oleh Departemen Agama Johor dan lebih dikenali pada masa kini sebagai Mahkamah Kadi. Mahkamahnya dibahagi kepada dua jenis yaitu mahkamah kadi dan mahkamah rayuan. Pada masa kini, hakim-hakim mahkamah syariah ini adalah terdiri daripada kadi-kadi daripada daerah itu sendiri.

Enakmen Administrasi Negeri Johor menyatakan bahwa yurisdiksi bagi kasus jenayah seperti kasus-kasus khalwat, minum arak, tidak berpuasa dalam bulan ramadhan dan lain-lain dan bagi kasus mal/sivil yaitu seperti kasus cerai, tuntutan anak, nafkah dan sebagainya adalah dengan menghukum bagi setiap kesalahan denda sebanyak tidak kurang dari RM1000 atau hukuman penjara tidak melebihi 6 bulan atau kedua-duanya sekali. Mahkamah Syariah di Negeri Johor telah wujud sejak tahun 1873 yaitu sebelum Undang-Undang Diri Kerajaan Negeri Johor disahkan secara bertulis pada tahun 1895 yang diperkenalkan oleh Maharaja Abu Bakar Johor, tetapi tidak mempunyai Enakmen Khas ketika itu.⁴⁵

Sebelum tahun 1895 dikatakan bahwa telah wujud jawatan Mufti dan Kadi. Data resmi yang terawal ditemukan menunjukkan jawatan Mufti dipegang oleh

⁴⁵ Sejarah Mahkamah Syariah <https://syariah.johor.gov.my/profil-jabatan/maklumat-jabatan/sejarah/> (terakhir kali dikunjungi pada 11 Januari 2019 Jam 12:50).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthajambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthajambi



Dato' Syed Salim Al-Attas dan jawatan Kadi yang dipegang oleh Dato' Haji Abdul Rahman dalam tahun 1873. Kedua-dua orang pemegang jawatan ini juga telah dilantik oleh Maharaja Johor sebagai Ahli Dewan Negeri dan dengan pelaksanaan tradisi menganugerahkan Pingat Kebesaran Negeri, kepada Pemegang jawatan Mufti dan Kadi Darjah Mahkota Kelas Pertama yaitu Sri Paduka Mahkota Johor (SPMJ) yang membawa gelaran Dato'. Sehingga tahun 1895 agak sukar diterangkan tugas Mufti dan Kadi karena tidak ada Departemen Agama ketika itu, yang jelas Mufti adalah juga sebagai Pendamping Hakim dalam perbicaraan di Mahkamah-Mahkamah Negeri Johor yaitu suatu amalan hingga ke tahun 1909 masihi.

Mahkamah Kadi pada mulanya berada di perkampungan yaitu selain di perkotaan sebagaimana dinyatakan mengikut fasal 27 Peraturan Mahkamah Kadi Syariah 1934 antara lain dijelaskan.⁴⁶

“Adalah kampung-kampung dalam bagian daerah tersebut di bawah ini dipersetujukan bagi kadi-kadi di tiap-tiap daerah mengadakan Mahkamah Kadi masing-masing bagi menjalankan perbicaraan yang berkenaan dengan Mahkamah Kadi. Kadi tiap-tiap daerah bolehlah berbuat ketentuan pada mengadakan bicara di kampung-kampung yang tersebut di mana tempat yang telah ditentukan maka lebih dahulu daripada ia menjalankan bicara di dalam Mahkamah kampung itu hendaklah ia memberi tahu kepada Kepala Polis yang di dalam daerahnya lebih dahulu tiga hari dengan menyatakan haribulan dan jam serta beberapa kasus yang

⁴⁶ Peraturan Mahkamah Kadi Syariah Tahun 1934.

hendak dibicarakan disitu. Adapun tentang mengadakan bicara Mahkamah Kadi yang ada di dalam kota- kota itu berjalanlah bagaimana biasa hanyalah bila mengadakan Mahkamah di kampung-kampung saja yang dibutuhkan berbuat seperti di atas.”

Berdasarkan amanat Undang-Undang Diri Kerajaan Johor 1895, fasal 28, Jemaah Menteri telah dilembagakan secara tertulis dan telah berlaku rombakan besar- besaran dalam struktur perjawatan Kerajaan Johor dan diantara Departemen baru yang dicipta ialah Departemen Agama dan Pelajaran dengan memperkenalkan penjawat Yang diPertuannya yaitu Yang Mulia Ungku Mohammad Khalid. Pada 20 Agustus 1932 satu Mukhtar Tahunan Kadi-Kadi Johor telah diadakan untuk membahas mengenai Mahkamah Kadi, Daftar Nikah Cerai, Kutipan Zakat, Pembagian Harta-harta Zakat dan Baitul Mal.⁴⁷

Yang Dipertuan Departemen Agama Johor ketika menutup muktamar ini menyifatkan “Inilah satu kumpulan orang yang dipertanggungjawabkan oleh Duli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan yang memelihara Agama Islam bagi orang Johor. Pada 1 Januari 1978 Departemen Agama Johor telah menubuhkan Mahkamah Syariah yang dikenali dengan nama Mahkamah Kadi mengikut peruntukan seksyen 58 cerai (1) dan (2) Enakmen Administrasi Agama Islam 1978 dengan had yurisdiksi jenayah membicara mana- mana kesalahan yang dilakukan oleh orang Islam dan yang berhubung dengan Enakmen ini yang boleh dihukum dengan denda tidak melebihi satu ribu ringgit atau penjara selama tidak lebih daripada

⁴⁷ Sejarah Mahkamah Syariah <https://syariah.johor.gov.my/profil-jabatan/maklumat-jabatan/sejarah/> Diakses Pada 6 Februari 2023 Jam 23:00.

enam bulan atau kedua-duanya sekali. Dalam yurisdiksi Malnya, mendengar dan memutuskan semua pembicaraan dalam mana pihak beragama Islam. Pelantikan Kadi Semua kadi-kadi terdiri daripada mereka yang dilantik oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan selaku Wali Al-Amr dalam Negeri sebagaimana yang diwajibkan pelantikannya itu dibuat menurut Hukum Syarak. Undang-undang Islam adalah undang-undang yang terbaik dan sesuai untuk kita semua karena undang-undang itu diwahyukan oleh Allah S.W.T yang disampaikan melalui Rasul pesuruhNya supaya dijadikan pedoman dan ajaran kepada kita semua dan kita hendaklah mematuhiNya.⁴⁸

Mahkamah Syariah mempunyai peran yang penting dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh masyarakat Islam dari masa ke masa. Menimbang hal tersebut, maka suatu Jawtankuasa petugas khas peringkat persekutuan telah dibentuk oleh kabinet dengan dipengerusikan oleh Allahyarham Tan Sri Syed Nasir Ismail dan antara jawatankuasanya ialah Profesor Tan Sri Ahmad Ibrahim (Sh. Kuliah Undang-undang, Universiti Islam Antarabangsa sekarang) dan beberapa anggota lain dimana jawatankuasa ini telah membuat laporan dan cadangan-cadangan suaya mengasingkan administrasi Mahkamah Syariah dari Departemen Agama Islam negeri-negeri dan menyusun semula sistem kehakimannya dengan member kuasa dan peningkatan taraf Mahkamah dan hakim-hakimnya.

Untuk mengembalikan Undang-Undang Syarak kepada kedudukan asalnya

⁴⁸ Sejarah Mahkamah Syariah <https://syariah.johor.gov.my/profil-jabatan/maklumat-jabatan/sejarah/> Diakses Pada 6 Februari 2023 Jam 23:00.

sebagai undang-undang negeri dan sebagai langkah awal ke arah menaikkan taraf Mahkamah Syariah dan mempertahankan kedudukan hakim-hakimnya sebagai pelindung Undang- undang Syariah maka suatu pindaan kepada Perlembagaan Persekutuan (Pindaan) 1988 (Akta A 704) Perkara 121 (1A) telah diluluskan oleh Parlimen dan seterusnya berkuatkuasa memperuntukan:-

1. Enakmen Mahkamah Syariah 1993

EMS93 adalah suatu Enakmen bagi menyatu dan meminda undang-undang berkaitan dengan Pendirian , Penyusunan dan Administrasi Mahkamah Syariah telah diluluskan oleh Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Johor pada 22 Disember 1993 dan telah diperkenankan oleh Duli Yang Maha Mulia Baginda Sultan Johor pada 27 Disember 1993. Sebagai langkah awal kearah melaksanakan tujuan pengasingan itu suatu pindaan Perlembagaan Persekutuan pada perkara 121 (1A) telah diluluskan dalam tahun 1984 dan seterusnya berkuatkuasa memperuntukkan:⁴⁹

“Bahwa Mahkamah Tinggi Sivil dan Mahkamah-Mahkamah dibawahnya tidaklah ada yurisdiksi di dalam mana-mana perkara yang termasuk di dalam yurisdiksi Mahkamah Syariah”

Perlaksanaan Pengasingan Mahkamah Syariah Dari Departemen Agama Seksyen 5 Enakmen Mahkamah Syariah 1993 memperuntukan Pendirian

⁴⁹ Sejarah Mahkamah Syariah <https://syariah.johor.gov.my/profil-jabatan/maklumat-jabatan/sejarah/> Diakses Pada 6 Februari 2023 Jam 23:00.



Mahkamah Syariah oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan atas nasihat Menteri Besar selepas berunding dengan Majlis dan seksyen 31 Enakmen yang sama memperuntukan , Mahkamah-Mahkamah Kadi hendaklah dikenali sebagai Mahkamah Rendah Syariah dan hendaklah disifatkan sebagai Mahkamah Rendah Syariah yang didirikan di bawah seksyen 5 Enakmen ini. Dengan itu Mahkamah Syariah telah diasingkan dari Departemen Agama Islam dengan rasminya pada 1 Januari 1996.⁵⁰

Dengan berlakunya pindaan ini membolehkan pengasingan administrasinya dari Departemen Agama dilakukan diperingkat Negeri. Mahkamah-mahkamah yang telah dipersetujui dan diperakukan itu adalah seperti berikut:-

- a) 1 buah Mahkamah Rayuan Syariah Johor.
- b) 2 buah Mahkamah Tinggi Syariah Johor.
 - i. Mahkamah Tinggi Syariah Johor Bahru;
 - ii. Mahkamah Tinggi Syariah Muar.
- c) 6 buah Mahkamah Rendah Syariah.
 - i. Mahkamah Rendah Syariah Johor Bahru;
 - ii. Mahkamah Rendah Syariah Muar;
 - iii. Mahkamah Rendah Syariah Segamat/Kluang;

⁵⁰ Sejarah Mahkamah Syariah <https://syariah.johor.gov.my/profil-jabatan/maklumat-jabatan/sejarah/> Diakses Pada 6 Februari 2023 Jam 23:00.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

- iv. Mahkamah Rendah Syariah Batu Pahat;
- v. Mahkamah Rendah Syariah Pontian;
- vi. Mahkamah Rendah Syariah Mersing/Kota Tinggi.

Adapun jawatan-jawatan yang dipersetujukan pada tarikh berkuatkuasanya mulai 15 Julai 1994 yaitu sepertimana tarikh berkuatkuasa Enakmen Mahkamah Syariah 1993.⁵¹

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

⁵¹ Sejarah Mahkamah Syariah <https://syariah.johor.gov.my/profil-jabatan/maklumat-jabatan/sejarah/> Diakses Pada 6 Februari 2023 Jam 23:00.

Lambang Departemen Kehakiman Syariah Negeri Johor dan Jata Negeri Johor.



(Lambang Departemen Kehakiman Syariah Negeri Johor)⁵²

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

⁵² Sejarah Mahkamah Syariah <https://syariah.johor.gov.my/profil-jabatan/maklumat-jabatan/sejarah/> Diakses Pada 6 Februari 2023 Jam 23:00.

(Jata Kerajaan Negeri Johor)⁵³

D. Visi, Misi, Piagam Pelanggan Dan Bidang Tugas Dan Wewenang

1) Visi

Visi Mahkamah Syariah adalah menjadi Institusi Kehakiman Syariah yang berwibawa. Ia adalah karena Mahkamah Syariah adalah

⁵³ Portal Rasmi Kesultanan Johor. <https://kemahkotaan.johor.gov.my/pengenalan/sejarah-kesultanan-johor/> Diakses Tanggal 7 Februari 2023 Pada Jam 02:00.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

tempat pengajuan bagi umat Islam yang mempunyai masalah dalam hal perkawinan, nafkah, penjagaan dan hal lain yang berkaitan dengan kehidupan keluarga di Daerah Johor Bahru.

2) Misi

Misi Mahkamah Syariah pula adalah melaksanakan perbicaraan, pengurusan mahkamah dan perkhidmatan sokongan secara professional, berkesan dan sistematik berasaskan undang-undang dan Hukum Syarak dan undang-undang secara cekap dan berkesan.⁵⁴

3) Piagam Pelanggan Mahkamah Syariah

“Memberi keadilan kepada pelanggan yang berteraskan kepada Hukum Syarak dan undang-undang”.

- a. Menetapkan tarikh sebutan / bicara kepada pelanggan pada hari pendaftaran kasus apabila segala dokumen didapati lengkap.
- b. Menyebut / membicarakan sesuatu kasus Mal dan Jenayah dalam masa 21 hari selepas di daftarkan.
- c. Menyebut / membicarakan dalam setahun sekurang-kurangnya 70% daripada kasus Mal dan Jenayah yang telah di daftarkan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

⁵⁴ Visi dan Misi , <https://syariah.johor.gov.my/profil-jabatan/maklumat-jabatan/piagam-pelanggan/> Diakses Pada 6 Februari 2023 Jam 23:00.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

- d. Menyiasat kasus atas setiap aduan pelanggan yang diterima dalam tempoh 14 hari dari tarikh aduan itu diterima.
- e. Mendengar rayuan pertama dalam masa 30 hari selepas rekod rayuan diterima daripada Mahkamah yang keputusannya dirayu.⁵⁵

4) Bidang Tugas dan Wewenang Mahkamah Syariah

Mahkamah Syariah Johor Bahru mempunyai yurisdiksi tertentu dalam menangani permasalahan perundangan keluarga Islam. Yurisdiksi Mahkamah Syariah diperuntukkan di bawah Pasal 62 nomor 1 yaitu sesuatu Mahkamah Rendah Syariah hendaklah mempunyai yurisdiksi di seluruh Provinsi Johor dan hendaklah diketahui oleh seorang Hakim Mahkamah Syariah.

Dalam Pasal 62 nomor 2 dalam akta yang sama menjelaskan yurisdiksi Mahkamah Rendah Syariah yaitu :

1. Dalam yurisdiksi jenayahnya membicarakan apa-apa kesalahan yang dilakukan oleh seorang orang Islam di bawah Enakmen Jenayah Syariah (Johor) 1995 atau mana-mana undang-undang bertulis lain yang menetapkan kesalahan-kesalahan terhadap rukun-rukun agama Islam yang baginya hukum maksimum yang diperuntukkan oleh Enakmen atau mana-mana undang-undang bertulis itu tidak melebihi tiga ribu ringgit

⁵⁵ Piagam Pelanggan <https://syariah.johor.gov.my/profil-jabatan/maklumat-jabatan/piagam-pelanggan/> Diakses Pada 6 Februari 2023 Jam 23:00.

(Sembilan juta rupiah), atau penjara selama tempoh dua tahun arau kedua-duanya dan boleh mengenakan mana-mana hukuman yang diperuntukkan bagi kasusalahan itu.

2. Dalam yurisdiksi malnya, Mahkamah Tinggi Syariah diberi kuasa untuk mendengar dan memutuskannya, jika jumlah atau nilai perkara yang dipertikaikan itu tidak melebihi saratus ribu ringgit (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) atau tidak dapat dianggarkan dengan uang (tidak termasuk tuntutan hadhanah atau harta sepencarian).

Kasusimpulannya, kasusemua tingkat mahkamah di atas mempunyai dua bagian penting yaitu bagian pengurusan pelaksanaan dan bagian mahkamah atau perundang undangan yang menjalankan fungsi dan peran pihak masing-masing berdasarkan Hukum Syarak dan Undang-undang Islam.

5) **Objektif Departemen Kehakiman Syariah Negeri Johor**

- a. Menyedia dan melaksanakan pengurusan dan pengadilan kasus-kasus syariah berdasarkan Hukum Syarak dan undang-undang secara cekap dan berkasusan.
- b. Menyediakan urusan administrasi yang cekap dan berkualiti bagi memuaskan hati pelanggan.
- c. Menyediakan latihan untuk mempertingkatkan kemahiran pegawai dan kakitangan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

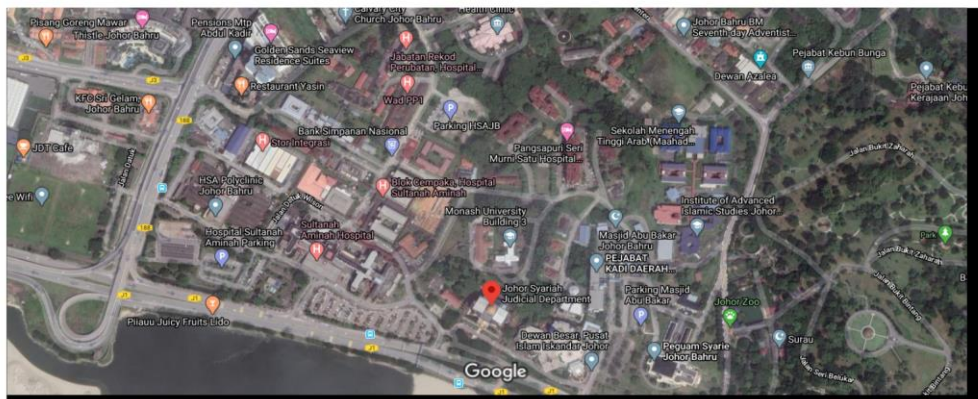


6) Lokasi Departemen Kehakiman Syariah Negeri Johor

2/17/2020

Johor Syariah Judicial Department - Google Maps

Google Maps Johor Syariah Judicial Department



Imagery ©2020 CNES / Airbus, Maxar Technologies, Map data ©2020 Google 100 m

<https://www.google.com/maps/place/Johor+Syariah+Judicial+Department/@1.4595735,103.748472,687m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x31da1295907da217:0xe1e2793f7ae3195f8m2!3d1.45787894d...> 1/1

(Lokasi Departemen Kehakiman Syariah Negeri Johor)⁵⁶

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi

⁵⁶ <https://www.google.com/maps/place/Johor+Syariah+Judicial+Department/>, diakses pada tanggal 7 februari 2023 pada jam 02:00.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Surtha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Surtha Jambi



(Lokasi Departemen Kehakiman Syariah Negeri Johor)⁵⁷

Departemen Kehakiman Syariah Negeri Johor terletak di provinsi Johor, tempatnya di Kota Johor Bahru yang beralamat di Departemen Kehakiman Syariah Negeri Johor, Lot 259, Jalan Abu Bakar, 80000 Johor Bahru, Johor. Bangunan Departemen Kehakiman Syariah Negeri Johor ini terletak di Samping Hospital Sultanah Aminah dan Pusat Iskandar Johor. Juga berdekatan dengan Masjid Negeri Abu Bakar, Pejabat Kadi Daerah Johor Bahru, Sekolah Menengah Tinggi Arab Johor, Kolej Pengajian Islam dan Zoo Johor.

⁵⁷ Lokasi Jabatan Kehakiman Syariah Johor
<https://www.google.com/maps/dir//Syariah+Court+Johor+Bahru+Malaysia,+259,+Jalan+Abu+Bakar>. Diakses Pada 7 Februari 2023 Jam 02:00.

BAB IV

MUT'AH TANPA SEBAB MENURUT ENAKMEN 17 TAHUN 2003

A. **Prosedur Permohonan Mut'ah Di Pengadilan Menurut Enakmen 17 Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Johor Tahun 2003.**

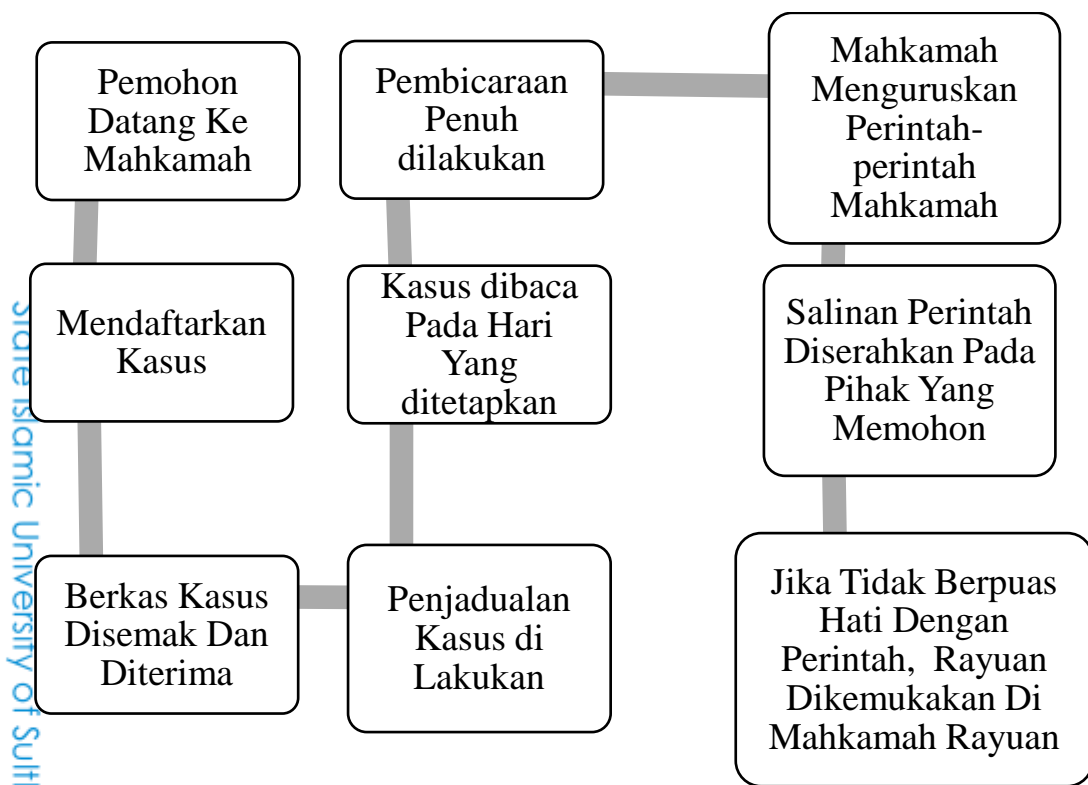
Mut'ah merupakan suatu tuntutan selepas penceraian. Ia diwajibkan keatas suami setelah bercerai dengan istrinya untuk menjadi bekalan bagi meringankan beban Wanita disebabkan perpisahan dan memulakan hidup baru tanpa suami. Mut'ah adalah bentuk pemberian yang menunjukkan rasa hormat kepada Wanita dan mengambil hatinya serta mengubati perasaan sakit hati yang tercipta dari perpisahan yang berlaku.

Di dalam seksyen 58 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Johor) 2003. Seksyen tersebut menyebut:

Mut'ah atau pemberian "saguhati" kepada perempuan yang diceraikan. Selain daripada haknya untuk memohon nafkah, seseorang perempuan yang telah diceraikan tanpa sebab yang patut oleh suaminya boleh memohon mut'ah atau pemberian saguhati kepada Mahkamah, dan Mahkamah boleh, selepas mendengar pihak-pihak itu dan apabila berpuas hati bahawa perempuan itu telah diceraikan tanpa sebab yang patut, memerintahkan suami membayar sejumlah uang yang wajar dan patut mengikut Hukum Syarak.⁵⁸

⁵⁸ Enakmen 17 Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Johor Tahun 2003

Maka, dalam prosedur permohonan tuntutan mut'ah seorang Wanita perlu mengajukan tuntutan mut'ah di mahkamah syariah melalui peguam syarie atau dirinya sendiri dan menyediakan berkas tuntutan mut'ah melalui dokumen "Penyataan Tuntutan". Wanita tersebut bisa menyatakan nilai atau jumlah yang diminta di dalam pernyataan tuntutan tersebut. Sekiranya nilai yang di minta kurang dari RM 100,000.00, hendaklah diajukan di mahkamah rendah syariah dan sekiranya nilai yang di minta melebihi RM 100,000.00, hendaklah diajukan di mahkamah tinggi syariah.⁵⁹ Carta prosedur mahkamah adalah seperti berikut:



Tabel 2

Aliran Pergerakan Kasus

⁵⁹ Wawancara Bersama Hakim Mahkamah Rendah Syariah Johor Bahru, Tuan Afizul

Wanita yang ingin memohon tuntutan mut'ah, harus datang ke mahkamah dan mendaftarkan tuntutan mut'ah menurut kekuasaan mahkamah. Setelah didaftarkan di mahkamah, berkas pernyataan tuntutan akan disemak dan diperiksa. Jika berkas yang didaftarkan lengkap, maka akan diproses dan diatur jadual bagi tuntutan itu disebut di hadapan hakim.

Selanjutnya mahkamah akan menyerahkan pemohon dan mantan suaminya kepada pihak majlis sulh. Majlis Sulh merupakan suatu kaedah dimana pihak-pihak yang terlibat di dalam suatu pertikaian terhadap beberapa tuntutan di Mahkamah Syariah Johor Bahru, akan dipanggil dan dipertemukan di dalam suatu majlis yang dipimpin secara rasmi, yang diaturkan oleh mahkamah berdasarkan aturan yang tertentu, dan sekiranya persepakatan berlaku, mahkamah akan mengeluarkan perintah tanpa melalui proses pembicaraan.⁶⁰

Sekiranya tiada kesepakatan, mahkamah akan meneruskan proses pembicaraan dan memutuskan mengikut aturan-aturan yang tertentu. Setelah diputuskan, mahkamah akan menguruskan perintah-perintah yang dikeluarkan. Salinan perintah yang dikeluarkan akan diberi pada pemohon.

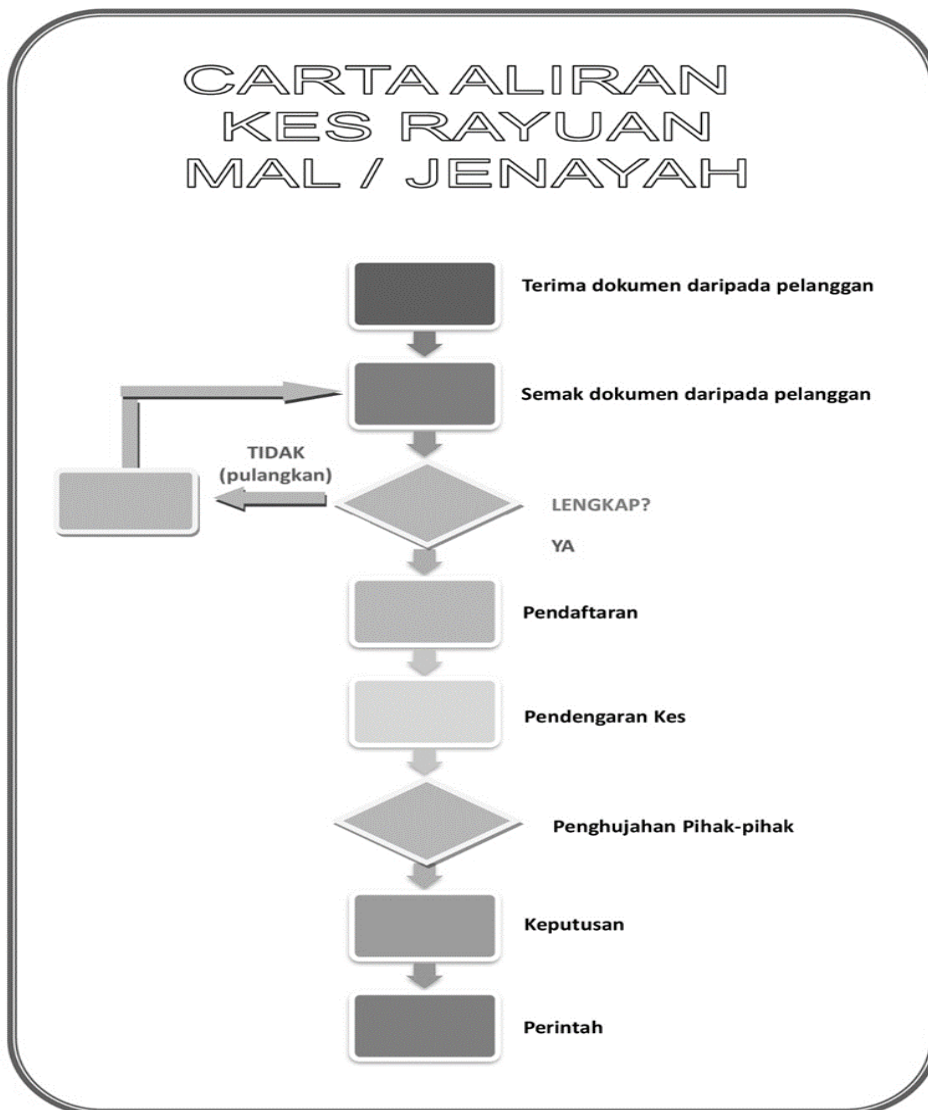
Jika pihak pemohon tidak berpuas hati dengan perintah yang dikeluarkan, pemohon bisa mengajukan rayuan kepada mahkamah rayuan. Proses rayuan akan diteruskan di mahkamah rayuan dan putusan yang akan dikeluarkan di mahkamah rayuan tidak bisa di rayu Kembali.

⁶⁰ "Majlis Sulh", <https://www.jakess.gov.my/index.php/ms/perkhidmatan/perkhidmatan-utama/majlis-sulh> diakses pada 28 Januari 2023 Jam 21:26

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthha Jambi





Tabel 3

(Aliran Kasus Rayuan Mal Atau Jenayah Di Mahkamah Syariah Johor Bahru)⁶¹

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthah Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthah Jambi

⁶¹ Carta Aliran Kes”, <https://syariah.johor.gov.my/perkhidmatan/prosedur-kes/carta-aliran-kes/#toggle-id-4> diakses pada tanggal 26 januari 2023 Jam 18:15

B. Putusan Pengadilan Dalam Memutuskan Jumlah Bayaran Mut'ah Yang Harus Dibayar Oleh Mantan Suami.

Dasar hukum yang digunakan oleh majlis hakim syariah di mahkamah syariah Johor Bahru dalam memberi putusan kasus tuntutan mut'ah tercatat di pasal 58 Enakmen 17 Tahun 2003 Mut'ah atau pemberian “saguhati” kepada perempuan yang diceraikan. Selain daripada haknya untuk memohon nafkah, seseorang perempuan yang telah diceraikan tanpa sebab yang patut oleh suaminya boleh memohon mut'ah atau pemberian saguhati kepada Mahkamah, dan Mahkamah boleh, selepas mendengar pihak-pihak itu dan apabila berpuas hati bahawa perempuan itu telah diceraikan tanpa sebab yang patut, memerintahkan suami membayar sejumlah uang yang wajar dan patut mengikut Hukum Syarak.⁶² Bersesuaian dengan solusi yang dikeluarkan oleh imam-imam dan ulama' mazhab Syafi'i.

Menurut mazhab Syafi'i, mut'ah adalah kewajiban setiap orang wanita yang diceraikan, baik sebelum atau sesudah melakukan hubungan seksual. Kecuali jika wanita tersebut bercerai sebelum disetubuhi dan maharnya telah ditetapkan, dia hanya dapat memperoleh setengah dari mahar tersebut. Juga, wanita yang tidak mendapatkan mut'ah adalah wanita yang terpisah karena kematian suaminya, perceraian karena alasan istri, dan perpisahan karena lian. Berbeda dengan mazhab

⁶² Enakmen 17 Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Johor tahun 2003

Hanafi, mut'ah bisa bersifat wajib atau sunnah. Mut'ah wajib dalam dua jenis perceraian berikut:⁶³

Perceraian *mufawwidhah* sebelum terjadinya persetubuhan. Atau disebutkan mahar utuk si sritri dengan penentuan yang rusak. Maksudnya perceraian yang dilakukan sebelum terjadi persetubuhan dalam sebuah pernikahan yang tidak disebutkan maharnya dan tidak diwajibkan setelahnya atau penentuannya rusak, maka suami wajib memberikan mut'ah kepada istri yang diceraikan tersebut.⁶⁴

Pendapat ini didasarkan pada firman Allah SWT Q.S al-Baqarah, 236:

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً مِّمَّا مَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدْرَهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ

Terjemah :

“Tidak ada dosa bagimu (untuk tidak membayar mahar) jika kamu menceraikan istri-istrimu yang belum kamu sentuh (campuri) atau belum kamu tentukan maharnya. Berilah mereka mut'ah, bagi yang kaya, sesuai dengan kemampuannya dan bagi yang miskin, sesuai dengan kemampuannya pula, sebagai pemberian dengan cara yang patut dan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat ihsan”.⁶⁵

Perceraian yang terjadi sebelum terjadi persetubuhan dalam pernikahan yang di dalamnya tidak disebutkan maharnya, hanya saja diwajibkan setelahnya.

⁶³ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqhul Al-Islam Wa Adillatuhu*. Terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Gema Insani: Jakarta, 2011, hlm.287.

⁶⁴ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqhul Al-Islam Wa Adillatuhu*. Terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Gema Insani: Jakarta, 2011, hlm 285.

⁶⁵ Q.S Al-baqarah 2:236.

Berdasarkan firman Allah SWT Q.S al-Ahzab, 49:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمِئْعُوهُنَّ وَسِرَّ حُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلاً

Terjemah :

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan mukminat, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya, tidak ada masa idah atas mereka yang perlu kamu perhitungkan. Maka, berilah mereka mutah (pemberian) dan lepaskanlah mereka dengan cara yang sebaik-baiknya”.⁶⁶

Dalam kasus *Ningal @ Yang Chik bin Hashim lwn Jamal bin Abdul*

Rahman (1986) 6 JH 146 pula, Hakim Hj. Harussani bin Hj. Zakaria menjelaskan mut'ah sebagaimana berikut:

“Mut'ah juga bertujuan menutup rasa malu yang dialami oleh istri, menghindarkan fitnah dan sebagai asas untuk memulakan hidup bersendirian. Seorang istri yang diceraiakan akan merasa malu dan mungkin pula menerima prasangka buruk dari masyarakat sekeliling. Untuk menghilangkan prasangka buruk bahawa seorang itu diceraiakan bukanlah kerana keaiban yang ada pada dirinya, maka mut'ah diwajibkan ke atas suami. Seorang istri yang lazimnya bergantung hidup kepada suami akan menghadapi kepayahan untuk memulakan kehidupan persendirian. Dasar mut'ah adalah keredaan kedua-dua pihak tetapi jika tidak tercapai persetujuan maka penentuan dibuat oleh Kadi. Penentuan kadar telah digariskan

⁶⁶ Q.S Al-Ahzab 33:49.

oleh Syarak dengan nilai kedudukan kaya miskin suami dan sifat serta keadaan istri. Sifat adalah perwatakan dan keadaan kedudukan keluarga atau status keluarga dalam masyarakat. Kaya dan miskin ialah nilai semasa dari segi perolehan dan penilaian.”⁶⁷

Putusan hakim dikeluarkan melalui pembicaraan penuh yang dilakukan di mahkamah berdasarkan keterangan pemohon dan saksi-saksi yang didatangkan oleh pemohon serta bukti-bukti yang tertentu mengikut kadar nilai sepanjang tempoh perkahwinan.⁶⁸ Keterangan dan bukti yang dikemukakan perlulah relevan dan tidak terbawa dengan emosi.

Seterusnya hakim akan menilai keterangan dan bukti yang diberikan berdasarkan kaedah-kaedah yang tertentu. Antara kaedah yang digunakan adalah menilai harta mengikut berapa tahun tempoh pernikahan pemohon. Selanjutnya nilai harga makanan atau nafkah istri sepanjang pernikahan mereka sehingga mereka bercerai mengikut hitungan harian.

Hakim juga harus memastikan bahawa ketaatan istri sepanjang pernikahan jika berlaku nusyuz yang disebabkan oleh perlakuan keji seperti khalwat dan zina maka terbatal tuntutan mut’ah pemohon. Selanjutnya memeriksa pendapatan suami ketika itu supaya tidak membebani pihak suami. Pembuktian istri dimahkamah tentang kemampuan suami perlu bersesuaian dengan apa yang dituntut oleh istri. Akhir sekali, hakim akan menilai dan mengeluarkan putusan berdasarkan pada siapa yang menuntut cerai terlebih dahulu. Jika suami yang menceraikan istri

⁶⁷ Jurnal Hukum 146 JKSM, Jil.6.

⁶⁸ Wawancara Bersama Hakim Mahkamah Rendah Syariah Johor Bahru, Tuan Afizul

terlebih dahulu maka istri bisa memohon mut'ah dan jika istri yang meminta cerai kepada suaminya maka istri tidak bisa memohon mut'ah.⁶⁹

Hakim juga perlu berpegang teguh kepada hukum-hukum syariat Islam, yaitu aturan yang telah ditetapkan Allah dengan cara yang benar dan juga mengagungkannya, baik untuk melindungi hak maupun menetapkan kewajiban-kewajiban.⁷⁰ Berdasarkan firman Allah SWT dalam Al-quran Surah Al-Maa'idah ayat 44 dan ayat 47:

إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا
وَالرَّبُّبِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ
وَإِخْشَاؤُنَ وَلَا تَتَّبِعُوا بآيَاتِي تَمَنَّا قَلِيلًا وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ

Terjemah :

Sesungguhnya Kami telah menurunkan Taurat. Di dalamnya ada petunjuk dan cahaya. Dengannya para nabi, yang berserah diri (kepada Allah), memberi putusan atas perkara orang Yahudi. Demikian pula para rabi dan ulama-ulama mereka (juga memberi putusan) sebab mereka diperintahkan (oleh Allah untuk) menjaga kitab Allah dan mereka merupakan saksi-saksi terhadapnya. Oleh karena itu, janganlah kamu takut kepada manusia, (tetapi) takutlah kepada-Ku. Janganlah kamu menukar ayat-ayat-Ku dengan harga yang murah. Siapa yang tidak memutuskan (suatu

⁶⁹ Mohd Sabree Nasri, *Hak Istri Selepas Perceraian Menurut Undang-Undang Keluarga Islam Di Malaysia: Analisis Faktor Penghalang Memperolehnya*, Journal of law & Governance KUIM, V.3 (2020)

⁷⁰ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqhul Al-Islam Wa Adillatuhu*. Terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Gema Insani: Jakarta, 2011, Jilid 8, hlm.94.

urusan) menurut ketentuan yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang kafir”.⁷¹

وَلِيَحْكُمَ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

Terjemah :

“Hendaklah pengikut Injil memutuskan (urusan) menurut apa yang diturunkan Allah di dalamnya. Siapa yang tidak memutuskan (suatu urusan) menurut ketentuan yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang fasik”.⁷²

Sering juga dikatakan bahwa seorang hakim harus menjaga kewibawaan pengadilan. Yang dimaksud bukanlah kewibawaan hakimnya, melainkan kewibawaan institusi dengan cara menjaga kewibawaan hukum yang digunakan untuk memutuskan perkara sehingga orang yang menghina hukum tidak dapat dimaafkan, baik dia orang yang mengajukan perkara maupun orang yang hadir dalam pengadilan.⁷³

Keputusan hakim di pengadilan merupakan suatu bentuk ijtihad yang bersifat mulzim yaitu perlu dipatuhi semua pihak. Ijtihad tersebut menjadi suatu perintah berkait dengan undang-undang yang memutuskan perbalahan (*khusumah*) antara plaintif dan defendan yang berlaku dalam bidang mal atau jenayah. Kedua-dua pihak terbabit perlu mematuhi keputusan yang dijatuhkan. Malah, hakim lain yang sama taraf tidak boleh membatalkan keputusan tersebut melainkan pihak yang

⁷¹ Q.S Al-Maa'idah 5:44.

⁷² Q.S Al-Maa'idah 5:47.

⁷³ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqhul Al-Islam Wa Adillatuhu*. Terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Gema Insani: Jakarta, 2011, Jilid 8, hlm. 95.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi

tidak berpuas hati boleh membawa kes berkenaan dibicarakan di mahkamah yang lebih tinggi. Ijtihad boleh ditolak jika terbukti percanggahannya dengan petunjuk nas yang qat'I, ijmak ulama atau menyeleng daripada kaedah-kaedah usul fiqh.⁷⁴

Keputusan hakim mahkamah rendah syariah boleh dirayu ke mahkamah tinggi syariah dan keputusan mahkamah tinggi syariah boleh dirayu ke mahkamah rayuan syariah. Hakim yang lebih tinggi tarafnya boleh membuat keputusan samada mengekalkan keputusan hakim sebelumnya atau sebaliknya.

Dari aspek penentuan kadar mut'ah pula, pihak-pihak boleh menentukan sesama sendiri. Namun jika persetujuan tidak dapat diperolehi atau terdapatnya pertikaian antara pihak-pihak, maka mahkamah akan menentukan kadar mut'ah ini dengan membuat pertimbangan ke atas kemampuan dan kerelevanan pihak yang akan membayar dan menerima mut'ah tersebut. Pemberian mut'ah ini boleh terdiri dari wang ringgit, pakaian atau barang-barang mengikut kesesuaian dan kemampuan pihak-pihak (Mohd Khairul Anuar,2014).

Terdapat banyak kes perceraian yang melibatkan tuntutan mut'ah telah dibuat di Mahkamah Syariah seluruh Malaysia. Kebanyakan para suami tidak memahami tentang tanggungjawab mereka untuk membayar mut'ah selepas terjadinya perceraian. Sebagai contohnya, kasus *Ramlah lwn Mohamed* (1980) 1 JH (2) 77, yaitu istri yang dicerai menuntut mut'ah bersama nafkah iddah. Kadi Besar

⁷⁴ Mohd Hapiz Mahaiyadin, Ph.D, “Memahami Proses Istinbat Hukum Syarak”, Excelligent Resources :Pulau Pinang, Malaysia, cet.2, 2019, hlm. 21.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthha Jambi



memutuskan pihak suami supaya membayar mut'ah atas kadar setengah bulan gaji suami setelah potongan yaitu RM698.⁷⁵

Manakala dalam kasus *Tengku Anun Zaharah bt Tengku Abdul Hamid lwn Dato' Dr Hussein bin Mohd Yusof* (1980) 2 JH 125 pula, istri yang telah diceraikan membuat tuntutan mut'ah.⁷⁶ Kadi Besar berpendapat bahawa perceraian yang dilakukan oleh penentang bukanlah atas kehendak pemohon sekalipun pihak menuntut ada membuat pengaduan, tetapi pengaduan itu lebih setahun yang lalu. Penentang dalam kasus tersebut gagal memberi kenyataan dari mana-mana Mahkamah Syariah bahawa pihak menuntut disabitkan nusyuz, khalwat atau zina. Maka, kadi Besar berpendapat tuduhan penentang adalah tertolak. Oleh itu, Mahkamah memutuskan pihak menuntut berhak mendapat bayaran mut'ah sebanyak RM25,200 dan bayaran hendaklah dibuat dalam tempoh 3 bulan dari tarikh hukuman dijatuhkan.

Dalam kasus *Tengku Puteri Zainah Iskandar lwn dato, Seri Mohd Najib Abdul Razak* (2004) CLJ (Sya) 347 pula, penentang telah menawarkan RM36,000 sebagai mut'ah, namun perayu menolak malah memfailkan tuntutan mut'ah berjumlah RM5 juta. Penentang menyatakan bahawa tuntutan RM5 juta adalah satu amanah yang tidak diterima akal dan tidak berpandukan ajaran Islam. Perayu kemudiannya memohon perintah supaya penentang menyampaikan butiran maklumat secara terperinci butir-butir harta lain dan harta tak alih milik penentang. Kadi Besar telah menolak permohonan perayu kerana didakwa berlawanan dengan

⁷⁵ Jurnal Hukum Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia 77 (2), Jil 1.

⁷⁶ Jurnal Hukum Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia 125, Jil 2.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthajambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthajambi



syarat perkara yang didakwa menurut acara dan beban pembuktian dalam undangundang Islam. Perayu dalam kes ini telah membuat rayuan, namun Mahkamah Rayuan Syariah juga menolak rayuan tersebut.⁷⁷

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthha Jambi

⁷⁷ Jurnal Hukum Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia 347.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan.

Di akhir bagian skripsi ini, saya sebagai penulis skripsi ini akan memberikan beberapa kesimpulan untuk memenuhi dan menjadi titik akhir dari kajian penulis, yaitu sebagai berikut :

1. Permohonan Mut'ah Menurut Enakmen 17 tahun 2003, pemohon atau Wanita yang ingin memohon tuntutan mut'ah, harus datang ke mahkamah dan mendaftarkan tuntutan mut'ah menurut kekuasaan mahkamah. Setelah didaftarkan di mahkamah, berkas pernyataan tuntutan akan disemak dan diperiksa. Jika berkas yang didaftarkan lengkap, maka akan diproses dan diatur jadwal bagi tuntutan itu disebut di hadapan hakim.
2. Putusan hakim dikeluarkan melalui pembicaraan penuh yang dilakukan di mahkamah berdasarkan keterangan pemohon dan saksi-saksi yang didatangkan oleh pemohon serta bukti-bukti yang tertentu mengikut kadar nilai sepanjang tempoh perkahwinan. Keterangan dan bukti yang dikemukakan perlulah relevan dan tidak terbawa dengan emosi..

B. Saran-saran.

Menurut pembahasan dan kesimpulan yang telah ditulis diatas, muncul beberapa saran yang bisa penulis berikan. Yaitu seperti berikut :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

1. Pihak mahkamah menerangkan dan menyediakan satu langganan khas bagi menerangkan cara memohon tuntutan mut'ah dengan cara yang sepatutnya.
2. Pihak yang berwajib mengadakan suatu Tindakan seperti membuat seminar yang menerangkan tentang tuntutan dan hak selepas penceraian.
3. Menerangkan syarat-syarat yang membolehkan seorang wanita memohon tuntutan mut'ah dan syarat yang menghalang wanita untuk memohon tuntutan mut'ah.

C. Kata Penutup.

Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang luas kekuasaan-Nya, dengan-Nya juga saya sebagai penulis dapat mengakhiri skripsi ini dan memenuhi syarat untuk memperolehi gelar sarjana hukum di fakultas syariah UIN STS Jambi. Setiap skripsi mempunyai cabaran dan dugaan masing-masing, alhamdulillah dengan doa dan usaha penulis dapat menghadapi segala ringtangan dan cabaran dalam menyediakan skripsi ini.

Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, bahkan masih banyak kekurangan yang ada dalam penelitian ini. Maka dari sudut hati yang paling dalam serta kerendahan hati penulis, segala kritikan dan teguran yang membina untuk masa akan datang amatlah penulis hargai.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



DAFTAR PUSTAKA

I. BUKU

Al-Quran dan Terjemahannya, Semarang: C.V. Toha Putra, 1989.

Asep Saepul Hamdi, *Metode Penelitian Kuantitatif Aplikasi dalam Pendidikan*, Yogyakarta : Deepublish, 2014

Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis serta Disertasi*, Cetakan ke-4, Kerinci: Stain Kerinci Press, 2015

Peter Mahmud Rezeki dalam H. Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis serta Disertasi*, Cetakan ke-4, Kerinci: Stain Kerinci Press, 2015

Ensiklopedi Islam, PT Ichtar baru van Hoeve, Jakarta

Abu Ishaq Ibrahim ibn ‘Ali ibn Yusuf al-Shayrazi, *al-Muhadhdhab fi Fiqh al-Imam al-Shafi’i*, Mesir, Matkbah al-Mustafa al-Babi al-Halabi,

Abi Bakar Utsman, *I’anah at-Talibin*, Juz 3, Dar al Kutub al Ilmiyah , 1995

M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, (Jakarta: Siraja, 2003), Cet. 1

Mohd Hapiz Mahaiyadin, Ph.D, “*Memahami Proses Istibat Hukum Syarak*”, Excelligent Resources :Pulau Pinang, Malaysia, cet.2, 2019

Bambang Waluyo, “*Penelitian Hukum Dalam Praktek*” (Sinar Grafika; Jakarta ; 2002)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, “*Metodologi Penelitian*” (PT. Bumi Aksara, Jakarta ; 2003)

Dr Ahmad Shuib Et.Al. “*Kaedah Penyelidikan Dan Pusat Reka Bentuk Pengajaran Dan Teknologi*”, Open University Malaysia, Edisi Pertama, Selangor Darul Ehsan: Meteor Doc. Sdn. Bhn 2018.

2. Aturan Undang-Undang

Enakmen 17 Tahun 2003 Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Johor.

Jurnal Hukum Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia.

3. Lain-lain

Mohd Sabree Nasri, *Hak Istri Selepas Perceraian Menurut Undang-Undang Keluarga Islam Di Malaysia: Analisis Faktor Penghalang Memperolehnya*
Journal of law & Governance KUIM, V.3 (2020)

Prof. Dr. Najibah Mohd Zin, *Hak Wanita Dalam Islam: Cabaran-cabaran Pemodenan dari Faculty of Shariah and Law Sultan Sharif Ali Islamic University*. 11-12 April 2012.

Syamsudin, “*Pengakuan Hukum Islam Terhadap Hak Mut’ah Mantan Istri Dalam Kajian Empat Mazhab (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan No. 1151/PDT.G/2008/PAJS)*”, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatillah Jakarta, (2014)

Rizqia Annisa Paramita, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Mut’ah Dalam Putusan MA RI NO.REG.441K/AG/1996*” Fakultas Agama Islam-Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, (2010)

Winarno Yudho, S.H., M.A., dan Heri Tjandrasari, S.H., “*Efektivitas Hukum Dalam Masyarakat*” , Jurnal Hukum & Pembangunan, Universitas Indonesia (1987)

CD *al-Maktabah al-Syamilah*, Sunan Ibnu Majah, Juz 5, No. Hadis: 1836.

Mohd Sabree Nasri, *Hak Istri Selepas Perceraian Menurut Undang-Undang Keluarga Islam Di Malaysia: Analisis Faktor Penghalang Memperolehnya* , Journal of law & Governance KUIM, V.3 (2020)

“Majlis Sulh”,

<https://www.jakess.gov.my/index.php/ms/perkhidmatan/perkhidmatan-utama/majlis-sulh>

Portal Rasmi Kerajaan Johor. <https://www.johor.gov.my/>

Portal Rasmi Jabatan Perangkaan Malaysia

<https://www.dosm.gov.my/v1/index.php>

Portal Rasmi Jabatan Perhutanan Negeri Johor. <https://forestry.johor.gov.my/>

Lokasi Jabatan Kehakiman Syariah Johor

<https://www.google.com/maps/dir//Syariah+Court+Johor+Bahru+Malaysia,+259,+Jalan+Abu+Bakar>

LAMPIRAN



Bersama Tuan Mohd Afizul Hakim Bin Ibakarim.

@ Hak cipta milk UIN Sutha Jambi

State Islamic University of Suthan Thaha Saifuddin Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Bangunan Mahkamah Syariah Johor Bahru.

@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi

State Islamic University of Suthan Thaha Saifuddin Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



CURRICULUM VITAE

A. Identitas Diri

Nama : Dennis Aiman Bin A. Romzi
Jenis Kelamin : Lelaki
Tempat / Tanggal Lahir : Kuala Lumpur / 26 April 1997
NIM : 101190111
Alamat : Pos 50, Kampung Parit Lapis Maimon,
83500 Batu Pahat, Johor.
Nama Ayah : A. Romzi Bin Rasep
Nama Ibu : Yuhanis Binti Ithnain

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal

- a. Sekolah Rendah Islam Seri Sungai Kajang, 2009
- b. SMA Parit Sulong, 2014
- c. Maahad Johor, 2015
- d. Kolej Pengajian Islam Johor (MARSAH), 2019

Jambi,
Maret 2023
Penulis,

DENNIS AIMAN BIN
A.ROMZI
NIM. 101190111